



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI VII DENGAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : V
Rapat ke- : ... (....)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 05 Juni 2024
Waktu : 11.26 s.d. 14.58 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta
Ketua Rapat : H. Eddy Soeparno, S.H., M.H (F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI).
Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos / Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII DPR RI
Acara : 1. Pembahasan Asumsi Dasar sektor ESDM RAPBN Tahun 2025;
2. Pengantar RKA K/L TA 2025;
3. Lain-lain
Hadir : 34 orang Anggota hadir dari 52 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/ F-Nasdem/ Ketua Komisi VII DPR RI.
2. H. Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDI Perjuangan/ Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
3. Maman Abdurrahman, S.T./F-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
4. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
5. H. Eddy Soeparno, S.H, M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

8 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H, M.H.
2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
4. Mercy Chriesty Barends, S.T.
5. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
6. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
7. Ribka Tjiptaning Ploretariyati
8. Bambang DH.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H.M Ridwan Hisyam.
2. Drs. Mukhtarudin.
3. Bambang Hermanto, S.E.
4. Dyah Roro Esti Widya Putri, BA, M.Sc.
5. Bambang Patijaya, S.E, M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

2 orang anggota dari 6 anggota:

1. Moreno Soeprapto
2. Dr. Ramson Siagian.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

5 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Akram, S.T, BE (Hons), M. Eng. Sc.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Hj. Ratna Juwita Sari, **S.E., M.M.**

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo.
2. Muhammad Nasir.
3. Drs. Hendrik H. Sitompul, **M.M.**

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring.
2. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
3. H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang anggota dari 3 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.

2. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Arifin Tasrif (Menteri ESDM).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Izin Pak Ketua, bisa kita mulai Pak Ketua?

Ibu Bapak Anggota Komisi VII, bisa kita mulai ya.

Pak Menteri, bisa kita mulai? Baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Salam sehat untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI,
Yang kami hormati Ibu Bapak Anggota Komisi VII DPR RI,
Yang kami hormati Menteri ESDM RI yang hadir beserta jajaran yang lengkap,
Seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bertemu guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir bersama-sama di ruangan ini untuk melaksanakan Rapat Kerja bersama dengan Menteri ESDM RI dan seluruh jajarannya.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan ke-V tahun 2023-2024, pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran, dengan agenda:

1. Pembahasan asumsi dasar sektor ESDM RAPBN Tahun Anggaran 2025, dan
2. Pengantar RKA K/L Tahun 2025

Berdasarkan data Sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir berjumlah 20 Anggota dari 7 Fraksi, sehingga dengan demikian kuorum telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Karena itu Pimpinan meminta

persetujuan Anggota agar rapat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka. Apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Atas persetujuan Anggota Komisi VII DPR RI dan dengan mengucapkan “*Bismillahirrahmanirrahim*” Rapat Kerja pada hari ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.28 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Sebelum melanjutkan rapat ini, kami mintakan persetujuan Ibu Bapak Anggota Komisi VII bahwa rapat ini selesai kurang lebih 2 jam dari saat kita mulai dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan kita bersama.

Apakah dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Ibu Bapak yang kami hormati,

Kebijakan sektor ESDM baik itu dari asumsi dasar maupun rencana kerja Pemerintah pada tahun 2025 harus dapat mendorong perekonomian lebih cepat serta berpihak pada rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut Komisi VII DPR RI pada hari ini akan mendalami dan membahas usulan asumsi dasar sektor ESDM dalam RAPBN 2025 yang akan disampaikan oleh Menteri ESDM RI.

Agenda selanjutnya Komisi VII DPR RI akan mendengarkan pengantar RKA K/L Kementerian ESDM RI Tahun 2025 yang akan dilanjutkan dengan pendalaman bersama seluruh Eselon I Kementerian ESDM RI.

Ibu Bapak yang kami hormati,

Untuk efektivitas waktu, Pimpinan meminta persetujuan Ibu Bapak Komisi VII DPR RI agar kita tuntaskan terlebih dahulu agenda pertama yaitu pembahasan asumsi dasar sektor ESDM RAPBN Tahun 2025. Setelah itu baru kita masuk ke dalam agenda selanjutnya yaitu pengantar RKA K/L Kementerian ESDM Tahun 2025.

Apakah dapat disetujui? Ya, baik.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**



Kami persilakan dengan bersama ini Bapak Menteri ESDM RI untuk menyampaikan pemaparannya terkait asumsi dasar sektor ESDM dalam RAPBN Tahun 2025. Kami persilakan Pak.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, kemudian para pejabat dari Kementerian, dari DEN, BPH, kemudian juga SKK, BPMA, Direksi dari BUMN, Pertamina dan PLN, serta hadirin sekalian yang berbahagia yang hadir pada kesempatan pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.

Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan amanah konstitusi yaitu rapat kerja dengan agenda yang pertama mengenai pembahasan asumsi dasar asumsi dasar sektor ESDM RAPBN Tahun 2025 dan yang kedua adalah pengantar RKA K/L Tahun 2025 dan yang ketiga nanti akan masuk poin yang lain-lain.

Terkait dengan asumsi dasar sektor ESDM Tahun 2025, kami sampaikan sebagai berikut:

Untuk pertama mengenai harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau ICP. Kementerian ESDM mengusulkan asumsi ICP dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar antara 75 sampai dengan 85 dolar US per barrel. Hal ini didasari atas realisasi rata-rata ICP sampai dengan Mei tahun 2024 sebesar 81,67 US dolar per barel dan saat ini kecenderungannya cenderung untuk turun dan serta berdasarkan proyeksi Polling Reuters dan Short-Term Energy Outlook dan Unite United State Energy Information Administration Department of Energy harga minyak dunia tahun 2025 diperkirakan ada pada kisaran 8,46 US dolar sampai dengan 87,79 US dolar per barel.

Selain itu faktor lain yang mempengaruhi harga minyak antara lain kesepakatan perjanjian pembatasan produksi minyak dari negara-negara OPEC+ yang menguasai kurang lebih 40% produksi minyak dunia, kemudian adanya unsur faktor penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap beberapa mata uang termasuk mata uang rupiah, serta adanya tensi geopolitik di dua kawasan yaitu Eropa Timur dan di Timur Tengah.

Kedua mengenai *lifting* minyak dan gas bumi. Mencermati realisasi sampai dengan bulan Mei tahun 2024 dan *outlook* 2024, *lifting* minyak dan gas bumi pada RAPBN 2025 diusulkan sebesar 1000, 1.583.000 sampai dengan 1.648.000 barel setara minyak per hari dengan rincian sebagai berikut, *lifting* minyak bumi sebesar 580 sampai dengan 601.000 barel per hari dan *lifting* gas

bumi sebesar 1000, 1 juta, 1.003.000 sampai dengan 1.047.000 barel setara minyak per hari.

Kemudian realisasi *cost recovery* hingga bulan Mei tahun 2024 sebesar 2,51 miliar US dolar atau 30% dari target APBN sebesar 8,25 miliar us dolar, sedangkan Outlook tahun 2024 diperkirakan sebesar 8,26 miliar US dolar. Pada APBN 2025 *cost recovery* yang diusulkan adalah sebesar 8,5 sampai 8,7 miliar US dolar.

Kemudian juga mengenai BBM dan LPG, volume BBM dan LPG bersubsidi. Pertama volume BBM bersubsidi, kami mengusulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar 18,84 sampai 19,99 juta kiloliter yang terdiri dari minyak tanah sebesar seteng 0,51 juta sampai 0,55 juta kiloliter dan minyak solar sebesar 18,33 sampai dengan 19,44 juta kiloliter.

Kebijakan volume BBM bersubsidi tahun 2025 yaitu melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan subsidi tersebut.

Terkait besaran subsidi tetap solar Pemerintah mempertimbangkan perkembangan indikator ekonomi makro khususnya ICP dan nilai tukar rupiah. Kemudian juga melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran untuk meningkatkan efisiensi belanja subsidi.

Penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan disertai registrasi konsumen penggunaannya untuk memastikan upaya pengendalian konsumsi berhasil dilakukan maka diperlukan sinergi dan koordinasi antar K/L dan dengan Pemerintah Daerah maupun Instansi terkait lainnya.

Kemudian mengenai LPG 3 kilogram, mencermati realisasi sampai dengan bulan Mei tahun 2024 dan Outlook 2024 Kami mengusulkan volume LPG 3 kilogram dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton. Hal ini didasari atas kebijakan melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG tabung 3 kilogram tepat sasaran menjadi berbasis penerima manfaat dan terintra intra integrasi dengan data penerima manfaat yang akurat.

Kebijakan tersebut dilakukan diantaranya dengan pendataan pengguna LPG tabung 3 kilogram berbasis teknologi sejalan dengan itu pengguna LPG tabung 3 kilogram adalah pengguna LPG tabung kilogram yang telah terdata dan tercantum dalam data *by name by address* sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan transformasi ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur serta kondisi ekonomi dan sosial Masyarakat.

Kemudian poin yang selanjutnya terkait dengan subsidi tetap minyak solar. Sampai dengan bulan Mei tahun 2024 dengan subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000 per liter, besarnya kompensasi yang dialokasikan sampai dengan bulan Mei tahun 2024 adalah Rp4.496 per liter. Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025, kami mengusulkan subsidi tetap untuk minyak solar adalah

sebesar 1.000 sampai dengan 3.000 rupiah per liter. Hal ini dilakukan mengingat harga keekonomian minyak solar mencapai Rp12.000, Rp12.100 per liter, sedangkan harga jual eceran adalah sebesar Rp6.800 per liter.

Minyak solar masih banyak dipergunakan antara lain untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro dan pelayanan umum sehingga diperlukan upaya menjaga harga jual eceran minyak solar. Dalam rangka efisiensi dan agar subsidi minyak solar tepat sasaran diperlukan dukungan peningkatan peran dari BPH Migas, kemudian PT Pertamina dan sekaligus juga Pemda dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi melalui program digitalisasi atau pengawasan di lapangan.

Kemudian poin yang selanjutnya terkait dengan subsidi listrik. Usulan subsidi listrik pada RAPBN 2025 sebesar 83,02 sampai 88,36 triliun rupiah dengan asumsi ICP antara US dolar 75 sampai 85 per barrel dan nilai tukar sebesar Rp15.300 sampai dengan Rp16.000 per US dolar, inflasi diasumsikan 1,5 sampai 3,5% sesuai dengan KIM PTKF 2025 tanggal 6 Mei 2024.

Usulan kebijakan subsidi listrik tahun 2025 yaitu tepat sasaran diberikan hanya kepada golongan yang berhak, untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan serta mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal dan lingkungan.

Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati,

Selanjutnya kami sampaikan pengantar RKA K/L Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2025 sebesar 9,38 triliun, namun sebagaimana surat bersama Pagu Indikatif atau SBPI Menteri Keuangan nomor S346/MK02/2024 dan Menteri PPN Kepala Bappenas nomor B20, nomor B201

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Mohon maaf Pak Menteri, kita bahas dulu asumsi dasar tadi sebelum nanti kita masuk ke RKA K/L ya biar kita fokus dulu menyelesaikan satu agenda ini.

Silakan Pak.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Untuk itu kami batasi penyampaian kami terkait dengan anggaran APBN terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjutkan dengan RKA K/L Tahun 2025.

Terima kasih Pak.



KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik terima kasih Bapak Menteri.

Kami juga menyampaikan apresiasi atas ringkasan asumsi dasar sektor ESDM untuk RAPBN 2025 yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilakan Ibu Bapak Anggota Komisi VII untuk bisa melakukan me, me menyampaikan pandangan, pertanyaan, tanggapan terhadap asumsi dasar yang disampaikan oleh Bapak Menteri tersebut.

Kami persilakan dari Fraksi PDI Perjuangan.

Baik, kami lanjut Fraksi Partai Golkar. Ya kita, kita sekarang fokus pada asumsi. Kalau ada? siapa? lanjut ya.

Baik kalau *gitu* Fraksi Partai Gerindra, Pak Dr. Ramson, silakan.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Soalnya nanti kalau lanjut-lanjut terus akhirnya enggak jadi rapat.

Pak Ketua dan teman-teman Anggota yang terhormat,
Pak Menteri dan semua jajaran yang saya hormati.

Ini pembahasan kita memang antara lain termasuk asumsi dasar sektor ESDM, tapi juga ada lain-lain karena kita juga perlu membahas isu-isu aktual yang terjadi di sektor ESDM di republik ini, seperti kasus-kasus proses terjadinya sudah menjadi isu publik 271 triliun kasus korupsi timah, juga kasus-kasus 2078 izin usaha pertambangan yang bermasalah, ini proses solusinya bagaimana? nah ini terus menjadi isu-isu yang aktual di publik.

Nah ini perlu dijelaskan oleh Pak Menteri perkembangannya karena beberapa tahun setahun lebih yang lalu juga pernah kita bahas ini tetapi laporan perkembangan belum pernah disampaikan oleh Pak Menteri solusi-solusinya karena ada menteri yang lain yang juga terus berbicara soal masalah-masalah izin usaha pertambangan padahal sesuai dengan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 116 bahwa hal-hal pencabutan ini adalah urusan Menteri terkait yaitu Pak Menteri ESDM, ini perlu juga dijelaskan termasuk tadi mega korupsi timah yang belakangan ini juga membawa-bawa bekas Dirjen Minerba yang juga di sini berkali-kali ikut rapat di sini, juga karena dua Dirjen Minerba, bekas Dirjen Minerba sudah proses hukum, jadi perlu juga dijelaskan oleh Pak Menteri tata kelola terkait Minerba itu bagaimana, artinya di sini bahwa antara lain yang dipersoalkan ada

keputusan-keputusan yang mendorong praktik pertambangan ilegal yang juga udah menjadi isu publik.

Jadi hal-hal seperti ini perlu dijelaskan ke publik agar terukur apa upaya-upaya menteri ESDM untuk turut memecahkan persoalan ini, karena tentunya karena timbul persoalan makanya masuk ke proses hukum oleh aparat penegak hukum. Jadi, karena untuk berikutnya perlu upaya-upaya dari sisi kebijakan untuk mencegah terjadinya persoalan-persoalan seperti ini, karena ini *kan* akan merugikan negara luar biasa besarnya karena bagaimanapun sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 bahwa hasil-hasil pertambangan ini adalah semua untuk sebesar-besarnya kemakmuran-kemakmuran rakyat.

Ini sebenarnya yang harus bisa dijabarkan di dalam bentuk kebijakan-kebijakan secara umum dan juga kebijakan-kebijakan yang imperatif yang operasional sehingga bisa betul-betul dirasakan oleh rakyat, ini yang masih kelemahan kadang-kadang di antara elite-elite kita ini. Jadi tolong nanti penjelasan Pak Menteri soal itu nanti mungkin sesudah menjelaskan asumsi dasar. Soal asumsi dasar bahwa di sini memang *lifting* gas itu ada peningkatan, tapi memang *lifting* minyak bumi menurun terus. Jadi kalau tadinya ada target-target 2.031 juta barel per hari itu tinggal mimpi di siang bolong aja.

Di satu sisi *cost recovery* meningkat, meningkat seperti tahun 2023 itu 7,67 miliar US dolar sekarang potensial di *outlook*-nya untuk RAPBN 2025 antara 8,5 ke 8,7 miliar US dolar, tetapi proyeksi *lifting* minyak menurun menjadi sekitar 580 ke 601 bisa aja saja ini mungkin jadi 590 ini di satu sisi *cost*-nya tinggi tetapi produksi minyaknya menurun.

Nah ini tolong dijelaskan nanti kalau *cost recovery* sekitar 8,5 ke 8,7 miliar US dolar itu dari volumenya *lifting* minyak bumi yang mungkin sekitar 590.000 barel per hari itu yang model *gross split* berapa persen, karena kalau yang *gross split* itu *kan* tidak masuk di dalam *cost recovery*. Jadi itu nanti tolong dijelaskan secara detail supaya publik juga tahu ini *kan* kita DPR RI wakil rakyat dipilih oleh rakyat.

Jadi kita harus bagaimana berpikir juga berbicara dan berbuat untuk kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, itu memang tugas wakil rakyat Pak Menteri, karena saya di sini sejak tahun 1999 Oktober Pak Menteri, jadi selalu di dalam pemikiran saya selalu seperti itu. Mulai dari di situ Menteri Pertambangan waktu itu Pak SBY sampai sekarang Pak Menteri. Jadi itu yang selalu hal-hal yang strategis idealis selalu saya bicarakan. Kalau soal yang teknis mikro itu apa namanya, hal-hal yang bisa masing-masing aja.

Terus yang berikutnya disini mengenai subsidi BBM dan LPG untuk minyak solar memang ini ada peningkatan karena memang kebutuhan di masyarakat saya lihat itu tidak ada masalah, la, Lapan ini ada peningkatan. Terus volume LPG juga menjadi 8,17 juta metrik ton itu saya pikir itu malah mungkin di publik perlu peningkatan kali, jadi peningkatan volumenya.

Tapi sebagai catatan juga Pak Menteri bahwa ini juga catatan untuk Pertamina itu kebetulan saya baru dari Dapil bahwa pangkalan itu laporan ini soal subsidi LPG mereka adalah pangkalan untuk LPG 3 kilogram tetapi diminta paling tidak satu tabung LPG yang 5,5 kilo harus dijual oleh pangkalan, tetapi si agennya memberitahukan kalau mereka membawa LPG yang 5,5 kilo khawatir nanti masuk viral disangka dia mengoplos, ini menjadi problem teknis memang tetapi ini bisa menjadi harus dibuat kebijakan solusi secara nasional khususnya mungkin oleh Dirjen Migas, sehingga kalau kita memberikan tugas ke orang usaha kecil pangkalan-pangkalan yang rakyat kecil yang mungkin hasilnya per bulan hanya 2,5 juta ke 3 juta, tetapi jangan menjadi kesulitan yang buat mereka harus ada solusi teknisnya.

Memang itulah kebijakan yang imperatif itu perlu kita men artinya memperlancar distribusi tapi di satu sisi pangkalan-pangkalan yang kecil itu tidak menghadapi kesulitan karena memang saya dengar bahwa Pertamina mungkin mendengarkan melaksanakan arahan dari Kementerian ESDM atau Dirjen Migas. Hal-hal seperti itu aja yang mau saya sampaikan Pak Ketua antara strategis nasional sama sedikit kepentingan rakyat kecil yang contoh case-nya kebetulan saya baru pulang dari daerah pemilihan.

Demikian soal subsidi listrik memang ini ada peningkatan tetapi memang PLN juga keuntungannya sudah naik terus itu tidak terlepas juga dari upaya Komisi VII DPR RI soal DMO dan DPO, *Domestic Market Obligation* dan *Domestic Price Obligation* yang mengakibatkan Pak Direktur melalui Pak Menteri Pak Direktur PLN, keuntungan gede kalau keuntungan besar otomatis kan ada bonus segala, itu konsekuensi namanya itu tidak apa-apa buat kita. Kita perjuangkan sebenarnya untuk kepentingan rakyat tapi ada namanya konsekuensi untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu direksi. Jadi itu aja sekedar ilustrasi Pak Ketua.

Terima kasih.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih Pak Ramson atas masukannya.

Ibu Bapak, kita, saya pikir kita sepakati, kita pembahasannya hari ini sebatas pada asumsi dasar dilanjutkan nanti RKA K/L. Jadi nanti hal-hal yang lain yang mungkin ingin disampaikan nanti kita cari forum lagi untuk kita bahas.

F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Izin Pimpinan dari Golkar, tadi kami pas izin

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya ya jadi itu ya, disepakati ya Ibu Bapak ya, biar ini betul-betul efektif. Dan satu lagi perlu saya sampaikan ini apa namanya sebagai *backup plan* saja andai kata pun hari ini masing-masing Fraksi belum bisa menyepakati asumsi dasar yang akan diajukan, kita masih punya cadangan rapat besok untuk bisa kita tuntaskan itu mungkin bisa saya sampaikan.

Kami persilakan Pak Bambang Patijaya.

F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan kemudian juga beserta rekan-rekan Komisi VII, Pak Menteri ESDM beserta jajarannya dan para badan yang terkait dengan Pertamina juga yang terkait dengan perminyakan dan segala yang hadir dalam ruangan rapat kita ini.

Ketika kita berbicara tentang persoalan yang ada di ESDM, memang kawan-kawan ini banyak tergelitik, tergelitik banyak hal yang ingin disampaikan. Tapi kita sepakatlah ya bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas tidak jauh-jauh dari persoalan asumsi makro.

Yang pertama Pak Menteri yang ingin saya gugah adalah kesadaran kita ketaatan kita di dalam menjalankan konstitusi. Kita berulang-ulang setiap tahun menetapkan asumsi makro, tidak ada satupun yang bisa tercapai. Saya tahu bahwa pimpinan tertinggi di dalam ini adalah Pak Menteri, tapi dalam itu jajaran itu ada satu ekosistem, di dalam itu ada SKK Migas, di dalam itu ada apa K3S dan sebagainya, dan sebagainya. Nah kita melihat apa yang menjadi dorongan angka pada hari ini. Untuk *lifteng lifting* minyak bumi ini,

Ini harus stop dulu atau gimana?

Eggak ini lagi adzan ni stop dulu atau lanjut terus?

Ini adzan ini

Eggak papa?

Oke,

Kita melihat bahwa dalam RAPBN 2025 yang diajukan ini 580 sampai 601. Jadi *kan* apa ya setiap tahun kita selalu disodorkan angka untuk turun turun turun turun. Nah, ini *kan* sesuatu yang apa ya menurut saya kok

kita seolah menerima begitu saja kenyataan dan kemudian proses *decline* ini berjalan begitu saja. Nah ini, saya liat-liat nih angka yang diberikan ini kemudian juga data-data yang diberikan, *lifting* minyak dan kondensatnya 15 K3S besar per 31 Mei, mulai dari nomor 1, Pertamina Hulu Rokan sampai paling nomor 15, TexCal.

Ini dengan apa pencapaiannya masing-masinglah, ada yang 79%, 76%, ada yang over. Hulu Rokan ini yang paling besar cuma 87%. Nah ini *kan* ada SKK Migas ya *kan*, jadi kami ini bingung loh Pak Dwi saya enggak tahu lagi mau ngomong apa, ini gagal loh, SKK gagal Pak Menteri ya, di dalam menjalankan amanat untuk menaikkan target *lifting* tidak pernah tercapai. Jadi saya sudah enggak tahu lagi mau ngomong apa, menurut saya mungkin SKK dan Pak K3S sudah sibuk dengan apa proses bisnisnya, tetapi *kan* juga ada amanat konstitusi yang harus kita capai.

Nah kalau semuanya cuma mengalir begitu saja, oh ya karena proses *decline* lah, **...(suara tidak ada 33.10)...** karena ini sudah bertahun-tahun kita sedot lah. Lalu kebaruannya apa didalam bagaimana mengatasi problem-problem itu, ya *kan*. Kalau kita berdiskusi dengan kawan-kawan SKK agak pening juga karena ngomongnya teknis terus, kalau kami *kan* yang bukan teknis ini *kan* ngomongnya secara agregat aja secara umum.

Kami tidak mampu secara teknis ya, membahas ini seperti apa tetapi tuntutan kami adalah bagaimana Bapak-Bapak sekalian Bapak dan Ibu yang diberikan tanggung jawab teknis itu, ini dapat menjalankan amanat ini sebaik-baiknya sehingga kenapa ya kegi, kegelisahan kawan-kawan Komisi VII saat ini adalah kenapa? karena APBN kita *kan* jebol jangan sampai kemudian target *listing* yang tidak pernah tercapai ini juga terus-menerus membebani, ICP-nya naik sekarang ya *kan*, dolar naik, ini *bleeding* kita sudah APBN.

Ya ditambah lagi yang proses yang ada di internal kita di Indonesia sendiri proses *lifting*-nya tidak pernah tercapai. Nah inilah saya pikir kita perlu, perlu kebaruan dalam hal ini. Saya enggak tahu istilah kebaruannya dalam artian seperti apa, apakah perubahan atau bagaimana, tapi yang jelas saya sejak tahun 2021 di Komisi VII sampai sekarang 2001, 2, 3, 4, 4 tahun, 3,5 tahun, ini ICP itu, eh bukan, target *lifting* itu enggak pernah tercapai.

Kita mendengar kabar baik, ini gas bumi ada perbaikan ya, ya saya pikir bukan hanya gas bumi saja *kan* yang harus kita perhatikan tapi yang jelas minyak bumi yang jelas kita ini impor BBM itu sangat besar. Nah ini saya pikir perlu menjadi perhatian dan kami Fraksi Golkar menyatakan tidak *happy* dengan kondisi ini, seperti itu.

Nah jadi mengenai untuk besaran *lifting* dan target-target yang lain kami pikir kami perlu mendalami lagi ya dari angka-angka yang diberikan oleh Pak Menteri, kami akan bahas lebih lanjut di internal. Untuk itu kami belum bisa menyatakan sikap terhadap apa yang menjadi pengajuan daripada Menteri ESDM.

Terima kasih atas waktu dan kesempatan, kami ucapkan terima kasih.



KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak Bambang.

Kami lanjut Fraksi Partai Nasdem, silakan.

Belum ada? Oke

Lanjut kalau *gitu* Fraksi PKB, Ibu Ratna, silakan.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan serta seluruh sahabat-sahabat Komisi VII,

Yang kami banggakan Pak Menteri beserta jajarannya, juga ada kepala SKK Migas, perwakilan dari Pertamina dan PLN, semuanya saja yang hadir.

Terima kasih paparannya Bapak, tadi kami sudah menyimak dengan seksama dan mungkin senada dengan apa yang sudah disampaikan oleh senior-senior sebelum saya bahwa kami ingin menanyakan bagaimana komitmen SKK Migas dalam hal ini untuk bisa lebih optimis dalam mencapai target-target *lifting* dari tahun ke tahun.

Yang pertama Pak, kalau misalnya di tahun sebelumnya itu selalu kita mencapai target untuk tidak tercapai. Kami berharap di tahun 2025 paling tidak ada semacam apa ya *balancing* gitu loh Pak. Kami berharap *outlook* di 2024 ada 1 juta 588,8 ini minimal bisa menjadi batas bawah dari target kita di RAPBN 2025.

Kalaupun misalnya itu dari *lifting* minyaknya menurun dengan berbagai pertimbangan saya berharap ini tetap bisa diisi dari *lifting* gas karena kita tahu kalau kita bicara transisi energi atau transformasi energi memang gas ini merupakan salah satu alternatif energi yang *Clean and Clear* gitulah. Jadi kami masih berpendapat bahwa *outlook* di 2024 ini adalah batas bawah yang bisa kita gunakan sebagai acuan RAPBN 2025, minimal Pak Menteri.

Yang berikutnya, terkait ICP. Kita tahu situasi global hari ini masih *unpredictable* gitu. Kalau menyatir kata-katanya Bu Menkeu, karena yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri gitu. Sehingga apakah *range* yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM ini tidak terlalu lebar ya Pak Menteri ya? mulai 75 sampai 85 ini loh, nanti kalau misalnya ada beberapa teman-teman Fraksi kita yang minta batas bawah ini Bapak yang repot Pak. Karena penghasilan kita dari minyak ini juga cukup tinggi, saya juga menghitung kalau misalnya ada perbedaan 10 *US dolar* aja dari harga ICP ini kita bisa rugi

ratusan triliun gitu, sehingga ini perlu dipertimbangkan. Kalau dari kami mengusulkan, Fraksi kami maksudnya ya, kita tidak terlalu jauh dari angka 82 US dolar, sesuai dengan *outlook* akhir dari 2024.

Yang berikutnya, tadi komitmen dari SKK sudah ya Pak justru ini juga sebagai patokan kami *cost recovery*-nya ini masuk akal atau enggak Pimpinan. Karena setiap tahun *cost recovery* ini selalu naik, ya walaupun kemarin sempat turun tapi ternyata *outlook*-nya juga tetap naik, cuman ini juga harus kongruen dengan apa yang dihasilkan gitulah Pak Menteri paling tidak sehingga kita bisa memberi pertimbangan lebih lanjut.

Yang berikutnya, yang terakhir, subsidi listrik. Saya sekedar mengingatkan bahwa di ruangan ini kita semuanya termasuk dari PLN itu sudah pernah bersepakat bahwa kita akan mendukung, kita akan mengawal, kita akan memperjuangkan terkait listrik desa yang saat itu hitung-hitungannya dari PT PLN membutuhkan tidak kurang dari 10 triliun dan kita semuanya sudah bersepakat kami di Komisi VII sepakat, pemerintah juga bersepakat.

Kami ingin menanyakan Pak Menteri, apakah dalam nilai subsidi listrik yang ada kenaikan ini sudah termasuk didalamnya terkait pengadaan Lides ataukah ini murni dibebankan kepada PT PLN ataukah memang ada skema-skema lain yang dipersiapkan oleh Kementerian ESDM?

Mungkin itu Pimpinan yang bisa kami sampaikan terkait persetujuan asumsi dasar sektor ESDM RAPBN 2025, kami akan memberikan secara tertulis dan resmi ke Pimpinan.

Terima kasih, mohon maaf kami akhiri.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,
Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(KETUA RAPAT BERGANTI
SEMULA: H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H.
MENJADI: SUGENG SUPARWOTO)**

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII
DPR RI):**

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Ibu Ratna dengan berbagai masukannya termasuk.

Baiklah, dilanjutkan dari Fraksi Partai Demokrat, dipersilakan.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Yang terhormat,

Terima kasih Pimpinan.



Para Anggota Komisi VII yang kami hormati,
Pimpinan dan Pak Menteri dengan seluruh jajaran yang kami hormati.

sebelum,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sebelum memberikan pandangan dan apa analisa maupun nanti juga apa persetujuan perihal asumsi dasar dari sektor ESDM ini tentang RAPBN di ta untuk tahun 2025, perlu kita ingatkan begitu asumsi dasar dan rencana kerja Tahun Anggaran 2005 ini *kan* yang akan disusun berada pada masa transisi pergantian Pemerintahan lah kurang lebih begitu, maka kita juga harus mempertimbangkan dan juga berkoordinasi agar apa yang disusun saat ini itu juga bisa bersinergi dengan program Pemerintahan selanjutnya.

Nah ini *kan* kalau di dalam *campaign*-nya *kan* lanjutkan ya mungkin ya tidak terlalu ada gap lah begitu Pak Menteri kira-kira. Tapi juga terkait apakah juga nanti *kan* kita bicara selama 5 tahun itu *kan* juga tentang energi hijau, nah ini juga perlu di dalam asumsi apa itu dasar ini juga program-program itu sinergi lah dan berkelanjutan lah kurang lebih begitu, ini yang juga apa harus menjadi catatan begitu. Karena *kan* nanti yang kita khawatirkan setelah kita putuskan nanti ada APBNP lagi, perubahan lagi yang kadang-kadang mungkin ada perubahan yang radikal, lah Itu juga akan apa itu untuk *adjustage*-nya juga akan repot begitu, karena *kan* berjalan 5 bulan, *iya toh?* ke depan *kan* ini kurang lebih ini enggak perlu, perlu matanglah kurang lebih begitu.

Dan juga tadi juga saya ingin memperkuat juga apa yang disampaikan oleh para sahabat tadi tentu saya ingat begitu 4 tahun yang lalu 4,5 ya dengan kita rapat kerja dengan, rapat dengar pendapat dengan Pak dengan SKK Migas begitu Pak Tif ya, waktu itu target kita *lifting* kita *kan* di kurang lebih di tahun 2029 itu akan mencapai 1 juta barel per hari. Nah ini *kan decline* itu ya dan kira ki apa ya proses tahapan-tahapan untuk mencapai itu kok semakin jauh, ini juga harus menjadi catatan kita, *concern* kita ke depan sektor daripada minyak ini kalau apa dan gas gas ada kenaikan tetapi sektor minyaknya ini harus menjadi prioritas ya, program strategis nasional untuk bagaimana apa *lifting* kita yang *decline* setiap tahunnya.

Satu sisi kebutuhan kita setiap hari 1.2 juta, kalau sudah terjadi dinamika politik global oh itu waduh, kita apa yang sudah kita keputuskan di dalam asumsi dasar 2024 ini pasti berubah, dolarnya ya dan juga apa itu risiko kalau ada perang itu *kan* pasti naik semuanya. Jadi ini perlu apa sinkronisasi koordinasi supaya di dalam membahas asumsi dasar ini makro ini kita bisa apa kalau terjadi perubahan tidak yang jauh-jauh amatlah kurang lebih begitu.

Kedua saya juga ingin men apa me-*headline* begitu tentang subsidi listrik. Saya juga ingin memperkuat apa yang disampaikan Ibu Ratna tadi, apakah ini juga sudah masuk di dalam listrik ya subsidi listrik ini masuk di dalam program-program untuk apa itu pembangunan infrastruktur listrik desa ya, ya elektrifikasi hijau kemungkinan ke depannya itu apakah juga juga sudah menjadi suatu apa *concern* hal-hal ini. Jadi apa kalau ini tentu kita juga akan

berikan apa dukungan juga, tentu, dengan dinamika harga dan juga mungkin kenaikan tingkat kemiskinan ya subsidi juga akan meningkat juga itu. Jadi pasti ada korelasinya hal tersebut, ini yang juga harus menjadikan suatu *concern*.

Kalau bicara tentang apa *lifting* minyak bumi tadi ya, gas dan juga minyak tanah, solar maupun subsidi kita juga akan perlu tidak hari ini mungkin ya Pimpinan, harus ada pendalaman yang apa tajam begitu untuk memberikan masukan supaya apa yang diputuskan nanti bisa diimplementasikan di tahun ke depan.

Demikian sementara Pimpinan, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Sartono dari Fraksi Partai Demokrat. Istilahnya itu loh perlu pendalaman tajam dan mendalam, wah kita membayangkan.

Ya dilanjutkan dari Fraksi PKS, Pak Mul, dipersilakan yang terhormat.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Terima kasih Pimpinan, Pak Menteri dan jajarannya serta teman-teman.

Saya terus terang salut dengan Pak Dwi ya ketika pertama kali menyampaikan visinya 1 juta barel. Saya rasa ini visi yang menyentak ya, yang betul-betul *eye catching*, *exciting* buat kita sehingga bertahun-tahun setelah itu DPR terpaku dengan angka itu, semangat kita ngusulkannya, ngegas terus ya, saya rasa itu. Tapi saya menemukan fakta pemerintah tidak mendukung, setengah hati, kondisi makronya tidak kondusif, gerakannya EBT, investasi anjlok, *natural declining*, pengusaha sebagian besar henggang.

Ya, saya rasa visi Pak Dwi gak pernah terwujud menjadi Inpres, kelembagaan SKK Migas tetep sebagai sebuah unit kecil yang padahal sudah di uji *judicial review* ya, harusnya sudah diganti kelembagaan itu. Sehingga berbagai gerakannya di daerah enggak bisa berhubungan dengan Pemda, masalah tanah, ya karena kurang *powerfull*, enggak hadir di Rapat Kabinet.

Jadi menurut saya di akhir-akhir masa 5 tahun ini ya memang Pemerintah enggak serius ngurusin ESDM, coba tuh Pak Bahlil bagi-bagi UPK untuk para ormas, baca kembali Undang-Undang Minerba. Badan Usaha, paling tidak koperasi di akal-akalin Badan Usaha yang sahamnya milik ormas dan harus mayoritas, yang luar biasa lagi mendapat prioritas khusus. Ya kalau kita baca Undang-Undang yang namanya prioritas diberikan pada BUMN atau BUMD *kan* begitu. Kenapa enggak fokus pada permasalahan-permasalahan

dasar kita, tetapi apa simpang siur kepada hal-hal yang baru ya yang menurut saya akhirnya kita enggak fokus pada ini.

Jadi saya sangat wajar sekali kalau *lifting* kita terus turun, memang itu tuntutan semestanya begitu, mesti turun, kita capek-capek bagaimana pun, Pak Gandung sampai stres, enggak bakal bisa, pasti akan turun lagi. Karenanya kita relakan saja ya segini-gini aja lah ya, jangan terlalu tinggi-tinggi *gitu*, cuma kalau bisa *cost recovery* nya juga jangan tinggi-tinggi dong, *kan gitu* ya.

Kira-kira itu yang kami sampaikan kalau detailnya juga kami sepakat dengan teman-teman perlu waktu sedikit untuk memastikan angka-angkanya.

Demikian, terima kasih Pimpinan.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Mul dari Fraksi PKS, terima kasih dengan berbagai penekanan dan juga masukan-masukannya.

Dilanjutkan Fraksi Partai Amanat Nasional, tidak ada?

Atau masih ada misalnya dari, ah PDI Perjuangan, kembali ke, sekarang putaran kedua, dipersilakan Ibu.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Ya baik terima kasih Pak Pimpinan.

Yang saya hormati Bapak Ibu Anggota, Pak Menteri dan seluruh jajaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera dan selamat pagi, siang bagi kita sekalian

Yang pertama ini berkaitan dengan ringkasan asumsi dasar sektor ESDM RAPBN 2025. Saya kira dari rapat-rapat sebelumnya rapat-rapat pendahuluan dengan Ibu Dirut Pertamina, kemudian dengan Pak Dirjen. Saya kira kita sudah banyak sekali memberikan catatan berkaitan dengan *lifting* minyak bumi dan *lifting* gas bumi. Dan saya kira memang agak sedih sekali ya karena tambah turun terus sementara harapan kita ada satu kegerakan terutama di tingkat kebijakan Kementerian dengan pihak SKK Migas Pak Dwi untuk memastikan realisasi *lifting* kita bisa lebih progresif.

Jadi kalau ini deklinasinya turun terus seperti begini maka saya enggak tahu ya *lifting* Migas ini saya kira apakah di dalam uraian ICP sampai dengan

poin 5 kita bisa tambah satu poin baru lagi. Karena kemarin Ibu Dirut Itu menjelaskan *proven to reserve* kita hanya 7 tahun flat, rata-rata. Jadi kalau tidak ada tambahan cadangan baru maka 2031 kita selesai. Sementara dari sisi energi terbarukan tidak ada yang terlalu terlalu, terlalu apa namanya terlalu cepat atau terlalu progresif kira-kira *gitu*. Bisakah di menutup masa periode kita ini untuk asumsi makro kita mulai menambahkan satu poin baru Pak, ini hanya usulan aja apakah itu memungkinkan dengan memasukkan subsidi EBT, saya enggak tahu ini harus dibicarakan, sudah saatnya.

Yang kedua Ibu Menteri kemarin di dalam rapat Badan Anggaran menyampaikan tentang kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal. Salah satu poin yang sangat penting untuk transformasi ekonomi an, ada dua hal, yang pertama itu efisiensi di sektor Migas, efisiensi, melakukan efisiensi dan kompen, efisiensi dan kompensasi yang harus dilakukan ya, di situ dicatat efisiensi dan kompensasi, perlu melakukan efisiensi dan urusan-urusan yang berkaitan dengan kompensasi. Dan yang kedua memastikan urusan energi terbarukan itu mendapat perhatian untuk bisa menurunkan emisi. Itu dalam catatan dan ini saya saya masih pegang catatan kemarin, efisiensi APBN. Jadi efisiensi subsidi dan kompensasi, *sorry*, efisiensi subsidi dan kompensasi untuk melakukan transformasi ekonomi nasional kita untuk 2025.

Saya ingin mendapatkan kepastian saja karena ini kita bicara nanti tentang subsidi-subsidi turun ke bawah. Pertanyaannya hari ini, kalau di kebijakan umum sudah ditetapkan kemarin itu kita memastikan ada dibuka komanya jadi bisa dikasih catatan dan saya kemarin memberikan pernyataan yang cukup keras. Kalau ini mau di dilakukan efisiensi, efisiensi subsidi, efisiensi subsidi dan kompensasi maka kita di Komisi VII ini kebijakannya seperti apa? hilang total sementara kita enggak punya alternatif lain yang berkaitan dengan ketahanan energi nasional.

Kemarin kita meminta untuk tidak dihilangkan kalau misalnya program makanan tambahan, makanan gratis mau dilakukan oleh Pak Presiden yang baru, 400 triliun harus dicari, jangan menghilangkan secara seketika subsidi energi nasional ini. Jadi mungkin ini bisa menjadi perhatian kita bersama untuk sama-sama mem-*protect* subsidi energi bagi kepentingan masyarakat banyak, itu menjadi catatan.

Yang kedua, untuk *lifting* minyak bumi. Untuk *lifting* minyak bumi di dalam *outlook* kemarin kita juga bahas cukup panjang dan lebar. Dalam RAPBN 2025 naik 103 sampai dengan 1003 dan 1047, karena ini berkaitan dengan surat BPH Migas ke Kemenkeu ter tanggal 6 Februari 2024. Kami ingin dapat catatan aja Pak Menteri berkaitan dengan *lifting* gas bumi. Sesungguhnya *kan lifting* gas bumi ini *kan* masih ada ruang cukup dibandingkan dengan *lifting* minyak bumi.

Gas kita banyak tetapi infrastruktur kita yang tidak memungkinkan untuk penyimpanan dan sebagainya. Jadi ini mungkin jadi perhatian juga untuk kita berkaitan dengan *lifting* minyak bumi, apakah kita tetap di angka 1003 dan 1047, mungkin kita bisa dapat gambaran juga terhadap *uncommitted cargo* tahunan. Jadi kita jadi *clear* kenapa dia ada di angka 103 dan 147.

Kalau *uncommitted cargo* nya kecil kenapa kita tidak naikkan signifikan aja gitu loh, melampaui batas atas 147 misalnya di 1,1 misalnya seperti itu ya, ini hanya catatan saja. *Cost recovery* saya belum mau memberikan pandangan karena di Fraksi kami juga belum ya mungkin nanti sesudah ini diambil keputusan untuk besok.

Kemudian untuk minyak tanah dan solar Pak. Untuk minyak tanah dan solar di dalam *outlook* 2024 0,51 ton kiloliter ya atau ton dibuka di angka 0,51 ke 0,56, saya minta mungkin naik ke 0,60 atau kita lebih ini lagi 0,5, 0,55 ke 0,65. Karena ternyata upaya kita untuk melakukan percepatan gasifikasi di Maluku tidak jalan Pak. Dan kami berharap apa namanya urusan yang berkaitan dengan minyak tanah jumlah penduduk miskin, miskin ekstrem bertambah Pak.

Saya kasih contoh ya untuk Indonesia Timur, Maluku itu dari 11 Provinsi, 6 provin, 6 kabupaten kota itu miskin ekstrem. Saya enggak tahu ya pasca ini mungkin karena pembangunan kita *heavy*-nya ke infrastruktur sementara dia tidak berdampak linear terhadap kesejahteraan masyarakat langsung.

Masyarakat miskin tambah tajam angkanya, sehingga kebutuhan untuk BBM bersubsidi baik minyak tanah dan solar saya kira penting untuk mendapat perhatian serius. Kalau teman-teman dari wilayah barat ingin memastikan juga untuk LPG 3 kilogram bertambah secara signifikan, kami yang kalau hitung minyak tanah dirupiahkan tidak besar Pak, begitu pun juga dengan minyak solar tadi saya coba hitung-hitung dibandingkan dengan kita *compare* ke apa LPG.

Kemudian untuk subsidi listrik. Untuk subsidi listrik ini naik di angka 83 sampai dengan 88 triliun, karena ada tambahan UMKM baru dan seterusnya. Kami ingin mendapat, kami ingin sebelum ini diambil keputusan. Kemarin Ibu Menteri baru memberikan data baru, tambahan masyarakat miskin sebesar 5 juta penduduk miskin, 5 juta penduduk miskin ekstrem bukan miskin.

Tambahan 5 juta penduduk miskin ekstrem yang menjadi data resmi kami untuk pembahasan APBN 2025. Apakah ini sudah dipertimbangkan masuk di dalam seluruh kebijakan-kebijakan subsidi baik BBM maupun LPG 3 kilogram termasuk subsidi listrik. Itu catatan yang berkaitan dengan asumsi makro.

Yang berikut berkaitan dengan *crude price*. *Crude price* ini angkanya *volatile* karena berkaitan dengan nilai tukar rupiah dan seterusnya termasuk ya berkaitan dengan situasi geopolitik global dan seterusnya. Kami ingin dapat gambaran saja Pak berkaitan dengan *forecast* di tahun depan 2025, angka yang ditawarkan kemarin di Banggar sama persis dengan yang dipaparkan di sini dari 70 sekian ke 85 seperti itu. Mempertimbangkan situasi geopolitik yang hari ini tidak mudah, tidak mudah yang bahasanya Ibu Menteri kemarin di tingkat global sangat tidak menentu sementara di dalam domestik tidak baik-baik saja. Itu kemarin bahasa Ibu Menteri, sangat tidak baik-baik saja.

Jadi kami percaya bahwa untuk nanti penetapan ICP ini untuk semua Fraksi mungkin mempertimbangkan aspek domestik maupun aspek global karena situasi yang tidak menentu sampai dengan tahun depan banyak ketegangan ketegangan politik yang terjadi dan seterusnya. Kalau kita pakai batas atas dari WTI, biasanya kita hitung selisih 3 digit turun, kalau 83 ada di angka 79.

Tapi kalau situasi semakin memanas kebutuhan yang dibutuhkan tinggi sementara stok terbatas, maka sudah pasti agak naik dari angka itu, maka kalau 85 mungkin ada di sekitar 82. Jadi mungkin ini juga menjadi apa namanya perhatian kita semua apakah ada di angka 7 ya 79, 82 ataukah kita pakai batas yang lebih atas lagi. Ini sebagai catatan dalam perkembangan kita pembahasan kemarin di Banggar dan mungkin kita bisa *adjustment* juga dalam pembahasan hari ini.

Yang terakhir ini soal K3S. Soal K3S baik untuk *lifting* minyak ini ada 15 KK besar dan untuk *lifting* gas itu juga ada 15 KK besar. Ini saya sampai memberikan kode semua hanya satu dua saja itu yang ada peningkatan melampaui batas yang ditetapkan oleh APBN, sementara untuk yang besar-besar di atas, K3S yang besar-besar di atas semuanya turun secara apa namanya secara bertahap dari tahun ke tahun.

Kami ingin bertanya saja Pak untuk, mungkin untuk 5 atau 7 K3S besar yang di atas ini usul ke Pak Pimpinan, apakah kita bisa undang mereka ke sini juga Pak, K3S baik untuk minyak maupun untuk gas? jadi supaya kita mendapatkan kepa, kepastian berkaitan dengan *lifting* minyak dan kondensat dan kemudian *lifting* gas, jadi ada gambaran yang lebih *clear*.

Kalau sekedar hanya sumur-sumur tua dan sebagainya ini pembahasan saya dari tahun 2014, masa sejak dari 2014 10 tahun lalu sampai dengan hari ini tidak ada perubahan yang signifikan, masa *kan* tidak bertambah baik ya, kira-kira seperti itu. Maka ini harus ada langkah bersama komprehensif antara pihak pemerintah, kementerian, K3S, kami DPR RI dan pemegang K3S ini, sama-sama kita bersepakat di sini sebagai pemangku kebijakan.

Kalau dia tidak naik signifikan tapi kira-kira di angka yang paling memungkinkan sehingga untuk penurunan naturalnya ini mungkin bisa kita tahan dengan lebih baik, karena ini cuma tertinggal 7 tahun. Kalau ikut betul turun turun terus seperti begini memang di tahun 2030 jadinya di bawah 100 atau di bawah 50. Iya karena sudah tidak ada lagi *proven to reserve* dan kemarin kita bahas cukup panjang dan lebar di dalam pembahasan baik dengan Ibu Dirut maupun kemarin dengan Pak Sekjen kemarin.

Saya kira mungkin itu beberapa catatan yang dapat kami sampaikan, khusus untuk terakhir ya Pak, terakhir khusus untuk penurunan emisi. Di dalam paparan pendahuluan, daftar isi poin 1, poin 2 dan poin 3 sebaiknya ini *kan* harus ada target-target utama yang besar yang harus dicapai oleh Kementerian.

Misalnya target penurunan emisi dari sektor energi, mestinya keluar di sini Pak, karena kalau di Banggar kita pegang dokumen dari yang Kementerian lain-lain targetnya itu keluar, kok dari Kementerian ESDM tidak keluar dalam pembahasan asumsi makro kita walaupun memang dia tidak menjadi asumsi utama ya tetapi perhitungan-perhitungan itu harus wajib kita masukkan untuk memastikan bahwa tanggung jawab kita untuk pencapaian NDC ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Saya kira itu beberapa catatan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya kembalikan ke Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

ya,

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bu Mercy luar biasa dari Hulu Artuki 7 tahun plus ya versi Pertamina dan seterusnya seterusnya iya dan terima kasih dilanjutkan

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Pimpinan, Pimpinan dari Golkar

F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK SITOMPUL, M.M.):

Pimpinan, izin Pimpinan

**(KETUA RAPAT BERGANTI KEMBALI
SEMULA: SUGENG SUPARWOTO
MENJADI: H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H.)**

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Golkar dulu kalo memang udah.

Demikian, saya kembalikan ke Pak Eddy.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang saya hormati, Pak Menteri dengan seluruh jajaran dan juga dari SKK Migas, Pertamina juga yang hadir.

Yang pertama tentu terkait seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang Patijaya tadi terkait dengan asumsi makro ya. Kami dari Poksi Golkar memang belum bisa menyimpulkan karena kami masih perlu pendalaman lebih lanjut kami ingin data-data komprehensif yang lebih lengkap sehingga kami bisa menentukan sikap dalam rangka penentuan asumsi makro khususnya di bidang energi ya.

Oleh karena itu kami meminta agar pembahasan tentang masalah asumsi makro ini kita tunda saja dulu ya untuk kita lanjutkan pada kan masih ada ruang ya masih ada waktu kita untuk menentukan menetapkan daripada asumsi makro baik menyangkut ICP, *lifting* dan lain-lain.

Yang kedua, terkait dengan masalah *lifting*, seperti yang disampaikan oleh teman-teman semua bahwa kita ini dari tahun ke tahun *kan* memang gemes ya. Jadi mungkin istilahnya gemes lah bukan marah ya gemes saja bahwa *lifting* kita ini *kan* enggak pernah lagi naik *gitu* ya. Jadi diturunkan targetnya enggak tercapai juga. Jadi setiap tahun target diturunkan tetapi enggak juga tercapai.

Nah tahun ini diturunkan lagi dan saya pesimis lagi akan tercapai target ini ya. Nah kalau kita melihat persoalan-persoalan seperti ini ya terkait dengan target *lifting* 1 juta barel 2030 yang tinggal kurang lebih 5 tahun lagi, saya kira saya saya pesimis dari dulu saya sudah sampaikan saya pesimis bahwa *lifting* 1 juta barel itu tidak terwujud karena semakin tahun *kan* makin turun bukan naik ya, jadi gimana mau mencapai kalau dia turun terus *gitu* ya. Oleh karena ini *kan* perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap target 1 juta barel 2030 itu. Ya kalau memang pemerintah tidak yakin lagi atau apa ya turunkan segera adakan revisi ya.

Nah kemudian terkait dengan masalah tidak pencapaian target, ini *kan* kembali lagi kita kepada kinerja kinerja daripada sektor hulu, dalam ini SKK Migas dan K3S ya. Saya enggak paham ya, enggak paham persoalan apa sih yang sebenarnya yang membuat ya *lifting* ini tidak pernah tercapai *gitu* loh ya. Padahal dalam diskusi seminar yang pernah saya coba ikuti ya artikel yang selalu dibuat, persoalannya itu sudah sudah diketahui sebenarnya, kenapa investor enggak masuk ya, kenapa lesu di sektor hulu ya, kenapa data kita tidak bagus.

Ini *kan* semua sudah tahu, tapi upaya-upaya perbaikan ke sana kok tidak dilakukan oleh baik Pemerintah maupun SKK Migas. Misalnya data, data seismik, saya minta, saya minta agar dibuatkan laporan data tertulis, tertulis sejauh mana data seismik kita yang dilakukan hari ini. Karena ini *kan* merupakan dasar bagi investor untuk masuk, kalau kita enggak punya data seismik yang baik, investor juga ragu untuk masuk. Nah ini kerjanya *anu* ini mungkin berikan biasanya *kan* ESDM memberikan penugasan ya ke Pak, untuk seismik ini datanya.

Saya interaktif sebentar Pak.



Untuk penugasan untuk data seismik kepada siapa Pak?

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Kita kepada SKK dan sudah dilakukan di tahun 2020 itu untuk daerah yang seluas, berapa kilo?

KEPALA SKK MIGAS (DWI SOETJIPTO):

32.000 kilometer

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

32.000 kilometer dan ini sudah disajikan dalam bentuk data yang inilah yang me, yang memudahkan sekarang investor untuk masuk. Nah ada penemuan-penemuan baru ya memang tapi memang masih gas, kita belum beruntung

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Belum minyak?

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Belum minyak, minyak, minyak ini masih harus kita upayakan lagi. Dan ada program lagi seismik yang sekarang justru akan dilakukan oleh K3S antara lain oleh Exxon ya, kemudian juga BP dan juga beberapa yang dari China.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Oke artinya dalam konteks ini data seismik kita kalau sesuai kayak Pak Menteri *on the track* berjalan ya artinya tinggal ada tren menuju kebaikan.

Nah yang kedua terkait dengan *fiscal term*. *Fiscal term* kita bagaimana hari ini? kan jadi keluhan investor juga Pak, tapi *fiscal term* kita juga gaada perbaikan-perbaikan masih *gitu-gitu* aja padahal itu juga menjadi parameter daripada apa *problem* daripada soal *fiscal term* ini, ini juga harus segera dibenahin.

Ini saya tahu Pak Pak Dwi agak greget dikitlah Pak Dwi kerjanya Pak Dwi *gitu*. Jadi agak kita ini progresif *gitu* ya jadi kerja hulu kita ini *kan* ketinggalan jauh ini keteteran. Jadi mungkin apa namanya ya *speed*-nya itu ditingkatkan *gitu* loh, *speed*-nya ditingkatkan. Jadi jangan sampai ya ngos-ngosan menghadapi apa antara konsumsi kita dengan *lifting* kita *gitu*, jadi kita kayaknya ngos-ngosan ya. Oleh karena itu saya mengharapkan ini kritik apa evaluasi menyeluruh ini pada SKK Migas ya dan K3S karena *cost recovery* kita naikin terus tiap tahun tetapi *impact* dari naiknya *cost recovery* juga tidak ber-*impact* kepada kenaikan *lifting gitu*, jadi kinerja hulu yang baik *gitu* loh.

Nah kemudian terkait dengan masalah subsidi listrik Pak, khususnya listrik Desa. Kalau subsidi listrik saya kira naiknya menjadi 15 triliun, naik 15 triliun dari 77 menjadi 83 kurang lebih, ini *kan* karena dasar yang dibuat perhitungan *kan* asumsi makro, asumsi makro yang tadi di ICP, kemudian dari dolar dan lain-lain sehingga berakibat terjadi kenaikan. Jadi sebenarnya rumah tangganya hanya nambah sedikit tetapi perubahan asumsi makro mengakibatkan naiknya daripada 15 triliun, kekurangan yang harus kita penuhi. Saya kira ini karena ini menyangkut rakyat, ya kita harus kita penuhi ya.

Yang ke berikutnya listrik Desa. Listrik Desa ini *kan* untuk tahun 2024 dan memang tidak ada PMN ya Pak Menteri ya bahkan waktu di Banggar waktu itu kita hanya membuat kebijakan saja agar agar tetap dilakukan. Nah atas dasar kebijakan dari rapat keputusan di Banggar *kan* akhirnya *kan* PLN mengeluarkan sendiri anggaran daripada PLN kurang lebih 4 triliun lebih untuk listrik desa 2024.

Tapi saya meminta agar ini ada ada penugasan Pak, jangan sampai nanti PLN nya bermasalah di kemudian hari karena ini *kan* uang uang *corporate*. Uang *corporate* itu *kan* pasti kalau di audit harus ada untung dan lain segala macam. Sedangkan distrik Desa Itu *kan* mungkin secara, secara bisnis memang pasti tidak menguntungkan *gitu* ya, tetapi ini *kan* hanya pemerataan keadilan energi bagi masyarakat sehingga PMN keluarkan 4.

Ini saya kira mungkin perlu ada penugasan dari Pemerintah kepada PLN terkait Lisdes 2024 yang sudah PLN keluarkan duitnya 4 triliun lebih itu. Sedangkan untuk 2025 *kan* saya dapat info bahwa sudah ada PMN kurang lebih 3 triliun untuk listrik desa 2025. Jadi tidak ada persoalan ya, tinggal yang 2024 ini perlu ada pemerintah memberikan penugasan secara resmi kepada PLN untuk melaksanakan lisdes 2024.

Saya kira itu, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Lanjut, silakan dari Fraksi Partai Demokrat.

Kami persilakan.

F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK SITOMPUL, M.M.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang saya hormati,
Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Sesuai dengan arahan dari Pimpinan kita mengacu kepada asumsi dasar sektor ESDM. Baik saya akan mulai, pertama Pak Menteri untuk mengkolaborasi terhadap target-target ini, saya kira saya enggak tahu apakah format ini sudah baku, saya enggak tahu, semestinya PNBPNya juga harus ditayangkan di sini juga Pak, biar kita tahu bagaimana gerakan apanya kinerja dari ESDM ini terkait dengan pendapatan negara.

Karena kalau saya lihat di sini Pak Menteri terkait dengan PNBPNi ada 1 sampai 16 nih Pak ya unit-unitnya *gitu* loh, apakah ini sudah tersa, ter apa namanya terakumulasi dari kinerja di bawah misalnya SKK Migas, apakah sudah termasuk di sini Pak pendapatannya? Nah ini perlu juga nih Pak, apa kami pendapatan, apa memang terkait dengan apa namanya misalnya Dirjen Migas ketenagalistrikan ini apakah pendapatan apa ini sebenarnya? apakah sudah masuk dalam kinerja dari ESDM keseluruhan? *gitu* loh, ya itu penting Pak disampaikan. Karena bagaimanapun kita mau mengetahui bagai, kinerja dari ESDM ini terkait secara holistik seperti itu, itu terkait PNBPN.

Berikutnya, saya boleh kasih masukan Pak, Pak Menteri ini kan kalau kita melihat kan ini *lifting* Migas *gitu* ya, ya *lifting* minyak bumi, gas bumi, saya *ndak* tahu apakah ini *kan* secara saya melihat secara holistik Pak apakah avtur tidak di Bapak kelola *gitu*, avtur. Ya harusnya disampaikan juga ke kita, kita *kan* bicara ini *kan* bicara sumber daya ya. Walaupun itu tidak subsidi Pak Menteri tapi paling tidak kita bisa memetakan bagaimana kebutuhan dari avtur *gitu* loh, karena penerbangan kita kelihatan *kan* perlu juga menjadi perhatian kita *gitu* loh.

Dan juga ini juga terkait juga di sini ada *lifting*, *lifting* ini artinya *kan* hasil dari *lifting* tu dijual keluar *gitu* ya baik dalam maupun keluar. Saya pingin tahu juga sebenarnya kebutuhan minyak di Indonesia ini berapa Pak? *day to day* *gitu* *kan* dan juga maksud saya adalah berapa kebutu dari kebutuhan ini yang bisa dipenuhi oleh dalam negeri produksi dalam negeri? dan berapa yang ekspor atau *sorry* impor? *gitu* loh berapa?

Saya kira ini perlu tahu juga nih secara menyeluruh *gitu* loh, berapa sebenarnya yang, apa, peredaran minyak, peredaran gas, peredaran avtur di Indonesia? ini sebenarnya *kan* harus tahu kita. Ini saya kira penting juga Pak karena kita mau mencegah kembali lagi bahwa ada ruang-ruang pendapatan negara ini bisa jebol, tidak bisa ditarik Pak.

Kalau yang dibaca-baca ini mudah, mudah ditarik *lifting* ini bisa, SKK bisa, bisa tarik tapi yang di luar ini bagaimana kita mengawasinya? contohnya BBM industri bagaimana kita mengawasinya? saya enggak, enggak melihat ini berapa berapa sebenarnya kebutuhan BBE minyak di Indonesia ini, *ndak* ada, biar kita lihat lagi akhirnya apa pendapatan kita bisa kita lihat lagi yang lain, tidak hanya dari SKK aja yang lain juga bisa, misalnya impor karena perdagangan minyak sepemahaman saya semua di situ harus ada pajak-pajak yang harus dipenuhi.

Iya nah ini yang saya kira kami mohon penjelasan dari Pak Menteri agar apa negara ini jangan jebol lagi pendapatannya dari sisi, contohnya aja saya

kira minyak industri contohnya *gitu* loh. Ya karena banyak pengaduan ke saya Pak terkait perdagangan minyak industri luar biasa gelapnya Pak, susah. Makanya saya deklarasikan pada pertemuan berikut yang lalu bahwa di Indonesia ini ada *oil and gas laundry*, ada Pak itu ada dan ini merugikan negara, terkait pendapatan negara. Karena apa ini kita tidak tahu nih pemetaan berapa sebenarnya konsumsi minyak di Indonesia ini, jadi susah memeta kita hanya berkuat dari ya *lifting* lah ya itu terus minyak tanah itu, ini juga harus dipaparkan sama kita.

Saya kira kita sebagai Anggota Komisi VII berhak mengawasi ini juga, bagaimana transaksi putaran-putaran minyak di Indonesia ini *gitu* loh, kita lihat *gitu* loh. Saya *ndak* tahu bagaimana Kementerian ESDM melakukan pengawasan terhadap perdagangan minyak di Indonesia ini dan itu perlu dijelaskan.

Dan dari *lifting* juga kita bisa mau lihat berapa sebenarnya dari *lifting* ini yang keluar dan digunakan di dalam. Jadi Pak Menteri ini mohon penjelasan, ini penting bagi saya. Karena mit ini terkait pendapatan negara ya yang selama ini jebol tidak bisa diawasi gara-gara pengawasan kita atau ini mungkin bisa jadi pembiaran atau apa sih saya enggak tahu juga atau ketidakmampuan bisa saja.

Bagaimana mengawasi semua, bagaimana perdagangan minyak itu terjadi di luar sana. Ini yang saya kira saya rekomendasikan konsentrasi dari ESDM untuk mengawasi semua minyak peredaran-peredaran minyak yang ada Indonesia ini ya, baik yang subsidi maupun yang industri, yang non subsidi. Ini penting Pak supaya kembali lagi kita ma, tidak mau bahwa Indonesia ini tumpahan, ya tumpahan tempat transaksi gelap khususnya minyak.

Berikutnya Pak Menteri terkait dengan *lifting* ya *cost recovery*. Saya kira Pak per Pak Menteri perlulah penegasannya agar apa *lifting-lifting* ini naik, *gitu* loh ya. Saya kira perlu adalah ya tindakan-tindakan yang luar biasa agar ini *lifting* ini naik, karena ini *kan* terkait dengan *cost recovery* juga. Jadi kita sangat berharap ada langkah-langkah yang strategis yang dilakukan Kementerian ESDM secara menyeluruh terkait dengan *lifting* ini.

Berikutnya kalau kita lihat subsidi Pak, kalau subsidi lihat tanah solar itu naik. Ketika masuk LPG 3 kilo, di tahun 2003, 8,5 metrik ton ini ya, terus di APBN-nya 803, *outlut*, *outlook*-nya itu 8,12. Ini 8,12 ini, artinya apa langkah-langkah Kementerian ESDM untuk ini. Karena kalau melihat *out* dari APBN dengan *outlook* ini jauh sekali ini Pak, jauh sekali ini, ini apa langkah-langkahnya untuk mengantisipasi.

Nah kalau kita lihat di 2025 dah naik dia 8,17 metrik ton, itu okelah. Tapi yang 2024 ni apa yang harus kita lakukan *gitu* loh? apa yang harus kita lakukan? kita pasrah aja udah ya kalau Pak, Ibu Sri Mulyani enggak mau kasih sudah, apa harus begitu? saya saya yakin ini juga akan berdampak kepada kebutuhan masyarakat *gitu*, masyarakat bawah terkait ini.

Nah inilah Pak Menteri yang penting menjadi perhatian kita. Kita kita melihat dulu di 24 ini bagaimana. Saya lihat nih dari angka LPG ini, waduh ini jauh sekali Pak 8, 803 ke *outlook*-nya 8,12, waduh ini berapa ton ini yang harus kita *support* lagi ini. Jadi saya kira perlu ada langkah-langkah keseriusan dan kembali lagi LPG 3 kilo ini terkait dengan masyarakat bawah Pak, masyarakat miskin yang harus kita penuhi.

Dan yang penting bagi kami Pak Menteri adalah bagaimana Kementerian ESDM melakukan pengawas, pengawasan terhadap terkait dengan Migas ini ya, baik itu minyak, gas dan juga avtur ya, ini juga perlu menjadi pengawasan. Kalau terkait dengan pertambangan nanti untuk sesi berikutnya saya sampaikan.

Saya kira *gitu* terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, selanjutnya Fraksi Partai Amanat Nasional, silakan,

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Izin pimpinan, dikit Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oh oke lanjut dulu.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Silakan Pak Gubernur dulu.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Pak Nasir, Pak Nasir dulu selesain ya.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Ya, kita persilakan Pak Gubernur Pak.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Makasih.



Yang saya hormatin Pimpinan Komisi VII, Saudara Menteri dan seluruh ini banyak Dirut-Dirut tapi enggak disebut satu-satu lah seluruh Mitra Komisi VII, Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII dan teman-teman Anggota Komisi VII.

Terima kasih.

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN,S.T):

Auranya udah aura Gubernur nih.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Amin amin.

Nanti ikut, apa ya Man, kampanye ya.

Makasih.

Menindak lanjutin mungkin hampir sama dengan teman-teman. Cuma mungkin perlu rapat sendiri mungkin konsen konsenyering sebelum diputuskan menurut saya *lifting* ini. Karena agak aneh *lifting*-nya posisinya seperti ini kenapa *cost recovery* nya naik *gitu*. Nah ini mungkin SKK harus menjelaskan dulu apa yang dinaikkan dari *cost recovery* ini, apa *project- project* yang Bapak buat di sana *gitu* yang membuat *lifting* ini jadi eh *cost recovery* ini jadi bertambah.

Nah *kan* harus jelas, nah *gitu* loh, yang saya tahu ini kepala SKK ini pengalaman perminyakannya enggak ada. Nah kalau di situ ada konsultan yang kuat, bagus, meng-*hire* perusahaan luar yang memang bisa menggambarkan secara detail bahwa *cost recovery* ini sudah menghasilkan potensi, potensi aja dulu, potensi, potensi aja, mungkin kita bisa menyetujui *cost recovery* ini, potensi aja.

Nah Ini potensinya pun kita enggak ada. Nah, cadangan mungkin *gitu* yang jelas berapa *gitu* nah *cost recovery* ini *gitu* baru bisa kita setujuin. Nah ini *lifting*-nya enggak berubah malah turun, kok *cost recovery* naik *gitu*, ini apa yang dlbuat *gitu*.

Nah kami dari Fraksi Demokrat bisa menolak secara fraksi menolak regulasi ini, karena menurut kami ini enggak bermanfaat. Kata orang-orang ini bahan *pacak-pacakan* aja ini *gitu*. Nah kita minta didetailkan dulu *cost recovery* ini, apa dia isinya, di mana tempat di *cost recovery*, ini baru *clear*. Nah kalau enggak ya percuma ini, ini berarti ada yang aneh didalam *cost recovery* ini, minimal cadangan, minimal ah ini akan akan jadi potensi besar, potensi lagi lah, potensi *ndak* usah yang barang nyata, masih potensi kita bilang. Tapi biayanya dibiayakan ke sana *gitu*, jadi *clear*.

Nah kalau enggak, izin Pimpinan, ini ceritanya bohong-bohong aja repot ini nanti kalau begini *cost recovery*, ini enggak bisa seperti ini *gitu*. Nah saya minta semua hukum melihat *cost* posisi ini, mengecek posisi ini baru *clear*. Ini di sini ada, mungkin ini ada ahli-ahlinya di belakang Pak Dwi ini, coba suruh ngomong seperti apa sih *cost recovery* ini di mana letaknya, baru *clear*.

Saya minta di kesempatan ini Pimpinan kalau ada waktu, maksudnya SKK ini menjelaskan *cost recovery* ini di mana *gitu* loh, nah baru *clear*. Ini harusnya Pak Dwi ini udah *pangsiun* dia, cari yang baru lagi, baru bagus, energiknya bagus. Nah cari konsultan dari dari negara-negara yang maju, enggak papa, kita bayar mahal tapi jelas *lifting*-nya ada *cost recovery*-nya dibayar kenapa karena kajiannya begini begini begini begini begini, *clear* sudah dibayarkan, nah jelas depositnya ada *gitu*. Nah kita enggak tahu sampai hari ini berapa deposit di Rokan itu, enggak ngerti, berapa deposit di Cepu itu, enggak paham *gitu*, potensinya berapa besar *gitu* loh. Maka susah kalau kayak gini, ini masyarakat lihat semua anggaran ini dibiayakan untuk negara kita.

Nah saya *pingin* di kepemimpinan berikutnya ini orang yang berpotensi, yang punya pengalaman, punya kemampuan duduk di sana, baru *clear*. Ini saya minta potensinya dulu Pak, dijelaskan potensinya apa ini *cost recovery*-nya sebesar ini? Cadangannya di mana yang besar? Berapa lama cadangan itu? Kita pergi ke Dubai itu dijelaskan cadangan kami sekian, jelas *gitu* loh, ada, ada dijelaskan di sana *gitu* loh.

Nah Dubai itu negara yang paling baik sekarang minyaknya dan penghasil minyaknya terbesar, menjelaskan berapa potensi kami berapa tahun lagi minyak kami habis, dijelaskan di sana. Nah kita mana yang jelaskan ini, *lifting* ini harusnya ngitung di sini *gitu* loh, *kan clear gitu*. Jadi kita enggak, kita bahannya enggak ada, penjelasannya enggak ada, uraiannya enggak ada, di mana kita mau minta detailnya *ini* kan enggak ada *gitu* loh. Anda dibayar di sana sama negara untuk menjelaskan ini, *kan* repot kalau kayak gini kita.

Saya ingin izin Pimpinan secara pribadi pun saya, saya *pingin lifting* ini digelar dulu secara detail, se terurai apa *lifting* itu, di mana letaknya. Kalau enggak, kami Fraksi Demokrat tidak menyetujui *lifting* ini, nah jadi biar *clear*. Ini enggak main-mainan *gitu* loh, enggak *ece-ecean gitu* loh. Nah dijadikan potensi, potensinya mana. Jadi kita oh negara kita pun punya cadangan kekayaan sekian, *clear gitu*. Kami Pak dari Riau, dari mulai Caltex, Chevron, sampai sekarang Pertamina, hasil 10% kami hanya menerima saja, enggak ada pembangunan yang nampak di Riau itu, *ndak* ada.

Kami minta BUMD Riau itu dijadikan K3S. 50% minyak Rokan itu kami yang kelola, baru *clear*, baru kami merasakan kekayaan Rokan itu, kekayaan Riau itu, baru *gitu* loh. Ini enggak, sampai sekarang *ndak* ada kami rasakan. Sudah berapa Kepala SKK di situ ganti, enggak ada. Dan enggak ada anak bangsa ini yang paham detail tentang perminyakan ini. Kalau ada suruh hadir di sini biar kita tahu berapa deposit minyak kita yang ada di Indonesia, seperti yang kita dengar di Dubai. Dubai itu bisa menjelaskan secara detail. Dia bayar orang-orang pintar, nah bisa, nah itu. Ini saya lihat dititipkan saja cuman kepentingan aja disitu tapi enggak ada hasilnya.

Jadi sekali lagi Pimpinan izin, saya minta, kita minta didetailkan dulu *cost recovery* ini baru disetujui. Nah kalau enggak, saya secara pribadi tidak menyetujui *cost recovery* ini. Itu catatan dari saya ya sebagai Fraksi Demokrat. Karena penting, karena *cost recovery* inilah yang harus kita, apa sih yang menjadi sumber minyak kita, di mana sumber minyak dan gas kita ini, itulah *cost recovery* tadi. Nah kalau enggak percuma *gitu* loh, nah kita enggak tahu cadangannya berapa *gitu*.

Terus yang kedua kami minta kepada Pak Menteri, kami dari Riau minta BUMD kami mengelola Rokan itu 50%, karena kami juga ingin menikmati kekayaan minyak Riau itu. Sampai sekarang 10% ini pun enggak jelas, sampai sekarang 10% ini pun enggak jelas. Kami minta 50% kami sebagai K3S BUMD-nya. Kita akan meng-*hire* seluruh orang-orang profesional untuk mengelola, jadi *clear*. Nah saya minta itu Pak Menteri, menjadi catatan. Nah jadi *clear*, jangan kita mulai dari Caltex, Chevron, sampai sekarang Rokan, Pertamina. Kita hanya menunggu saja enggak ada kepastian.

Yang ke, yang berikutnya untuk subsidi solar. Subsidi solar ini saya minta fungsi pengawasannya, fungsi pengawasannya, adanya BPH ini untuk apa *gitu* loh. Setiap SPBU semua punya mobil modifikasi, dalam 1 jam BBM-nya bisa habis, dimana fungsi pengawasannya? kalau enggak, BPH ini dibubarkan, balikkan ke Kementerian. Nah di Kementerian aja dibesarkan fungsi pengawasannya, itu jauh lebih baik, karena sistemnya sudah ada di sana.

Karena cuman Bapak tugaskan aja Pertamina ini dan BPH ini enggak tahu juga, enggak ada juga kasus yang naik satu pun, termasuk LPG 3 kilo. Kami *pingin* LPG 3 kilo ini benar-bener sampai ke pangkalan, *ndak* ada lagi di pengecer. Nanti di sini harganya 8, 20.000, di pengecer harganya 30, 35.000, 40.000. Siapa yang bertanggung jawab tentang ini, saya minta tertibkan ini. Mungkin kunjungan yang di, yang rapat semalam sebelum yang rapat ini dengan Dirut Pertamina itu bisa kita tindak lanjutin Pimpinan untuk kunjungan ke lapangan dan bisa merapikan regulasi subsidi-subsidi yang diberikan oleh negara ini.

Mungkin itu saja sekali lagi untuk *lifting*, kami minta dijelaskan secara detail dulu dan bahannya di-*share* dulu dengan seluruh teman-teman dan mungkin itu baru bisa diputuskan. Mungkin itu, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Nasir.

Lanjut Pak Nasril Bahar, silakan Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan Anggota Komisi VII yang kami banggakan dan kami hormati, Pak Menteri dan segenap jajaran yang kami hormati.

Terhadap asumsi dasar untuk 2025 Pak Menteri ya, saya tadi menghitung pertanyaan demi pertanyaan ada 12 pertanyaan dari keanggotaan ya Komisi VII, pertanyaannya semua hampir sama. Semua pertanyaannya yang mendasar tuh adalah yang paling kelihatannya penasaran terhadap penurunan *lifting* ya, dari target 2024 ya terhadap realisasi yang akan tercapai ya, ini yang mendasar ya. Dari angka 635 ya menjadi 56, 561 890.

Tentunya Pimpinan ya ini yang harus kita *breakdown* terlebih dahulu, baru dah naik ke atas terhadap asumsi di 2025. Penurunan ini apa sebabnya? *Kalo cost recovery* apa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu dan apa yang kita anggarkan di 2024 yang lalu, ini sudah mencukupi terhadap keinginan daripada pemerintah, yaitu SKK Migas.

Nah ini yang kita ini *breakdown* ini, apa? di mana? persoalannya apa? *Breakdown* ini tentunya Pimpinan enggak bisa kita modelkan rapat seperti ini, enggak bisa kita tumpukan mentah-mentah persoalan ini kepada Pak Menteri, kepada Pak Dwi sebagai Kepala SKK Migas, tentunya di belakangnya ada jajaran, ak, apa, siapa saja sesungguhnya K3S itu yang bertanggung jawab terhadap tak tercapainya persoalan *lifting* tadi.

Usulan saya pertama Pimpinan, model rapat seperti ini tidak pas untuk kita untuk mengikat ya, ini kan sebuah ikatan. *Mandatori* yang diberikan oleh rakyat kepada DPR dan *mandatori* yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah, c.q. juga DPR kepada pemerintah untuk ya pencapaian target.

Nah ini ada 15 K3S besar untuk minyak dan ada 15 K3S untuk gas. Nah untuk *lifting* minyak ini tentunya kita ingin pertanggungjawaban. Di halaman 10 ini Pak Dwi, kita minta pertanggungjawabannya ini dari target 635 ini kenapa bisa 561. Pertanyaan untuk Pak Dwi, tolong kami diyakinkan data yang Bapak sampaikan pada halaman 10 ini, tolong kami diyakinkan yang disampaikan pada halaman 10 ini seyakini-yakinnya inilah dia, sehingga DPR tahu dan rakyat juga tahu.

Dengan bungkus selembar, dengan narasi yang dibangun Bapak hari ini tentunya tidak dapat meyakinkan kami, enggak dapat meyakinkan kami ini dia 561. Bagaimana kita akan beranjak kepada 2025 kalau 2024 saja kami tidak yakin. Ini persoalan mendasar bagi saya secara pribadi Pak Ketua Pimpinan ya, Pak Menteri tolong kami diyakinkan.

Data apa yang dapat Bapak suguhkan kepada kami? Kalau data 2024 ini tidak dapat Bapak suguhkan, bagaimana kami akan menyetujui asumsi dasar 2025, ini logika yang akan kita, bukan logika Pak, data. Kalau logika ini bisa nanti yang mengambang-ngambang ke mana-mana, yakinkan kami

tolong. Kalau kami sudah yakin ini data 561, tentunya yang apa yang disuguhkan oleh pemerintah untuk asumsi dasar 5, 2025 pada posisi, pada posisi 580 ke 601 atau 595 *output*-nya tentu kami bisa menerima. Tentu kami bisa menerima, kami yakin bisa menerima.

Tapi kalau data yang 2024 tidak dapat Bapak yakinkan kepada DPR, tentunya bagaimana kami menerima untuk asumsi 2025. Itulah yang mendasar bagi saya ketika saya menyimak satu persatu pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan ya, sehingga ya kalau data ini yakin dan berapapun **...(suara rekaman terputus 1.37.45)... (selanjutnya melihat & mendengar rekaman bersumber dari YouTube 1.35.00)**, targetnya kedepan, maka *cost recovery* ini bisa tertutupi. Oh ternyata Bapak minta tambah iya kita tambah karena kami yakin. Ini *kan* harus yang kita bangun adalah *trust* antara dalam membangun ini di dalam menyusun *budgeting* 2024, *kan trust* yang kita bangun kepercayaan ya ya di dana masyarakat, dana pajak, dana PNBPN yang akan dikelola oleh pemerintah yang diawasi oleh DPR. Inilah sesungguhnya yang saya pikir yang mendasar bagi saya. Tolong kami diyakinkan ya kenapa *lifting* minyak 2024 itu turun sehingga asumsi 2025 ini bisa kita setuju ke depan. Kalau kami tidak yakin maka ya akhirnya ya negara kita akan menjadi negara importir ya minyak.

Yang kedua Pak Menteri ya khususnya kepada subsidi Pak ya. Untuk subsidi solar ya ya tentunya penyimpangan-penyimpangan di lapangan tak terlepas daripada kenakalan-kenakalan ya. Bapak pemangku jab, pemangku kebijakan dan juga pemangku kepentingan dan juga pemegang otoritas ya dari berapa lini ya terhadap solar ini tentu penyimpangan ke solar tambang Pak, sedikit banyaknya pasti ada.

Untuk mengurangi subsidi ini kami sarankan ya ketika RKAB pertambangan Bapak keluarkan tolong diiringi dengan ya, dengan kuitansi atau nota pajak yang diberikan penambang-penambang yang berada di republik ini ya, sehingga ya ini *clear, clear* bahwa penambang-penambang itu tidak ya mendulang solar-solar ilegal ya, solar-solar colongan-colongan dan juga pasukan-pasukan yang ilegal.

Kebijakan ini saya berharap ya apakah bisa Pak Menteri di saat-saat ya mengakhiri masa jabatan ini ya, tentunya kami berharap ya, ya. Seluruh yang minta otoritas kebijakan ataupun minta izin melalui Kementerian ESDM harus diiringi nota pajak dari penyalur resmi, pendistribusi resmi solar, apakah dari Pertamina dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada inilah saya pikir untuk mengantisipasi ya, apa yang terjadi. Karena apa disparitas antara solar industri, solar subsidi ini *kan* sangat tinggi. Apapun dilakukan demi anak, keluarga dan kekayaan dan sebagainya. Ini usulan saya Pak Menteri untuk mengurangi ya, untuk mengurangi salah satu walaupun tak berkurang, walaupun kalau memang dibiarkan pasti ini akan nambah nambah nambah terus.

Untuk subsidi LPG 3 kilo ya, saya pikir tolong dicermati ya tentunya. Pertama saran saya harus tercukupi, harus tercukupi kebutuhan rakyat, kebutuhan rakyat ya. Sehingga hal ini juga merupakan *bahagian* ya untuk menenangkan kenyamanan bagi rakyat kita.

Dan mengenai listrik, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Jusman kemarin ya, ya, telah mem-*breakdown* naik turun naik turun ya dari, dari anggaran 20, 2024, jadi 73 ya, masih bisa kita terima Pak ya, ya. Tapi belum tentu, tu akan kita *breakdown* kembali ya Pak ya, tidak sampai kemarin saja, sehingga *reasoning*-nya ya dapat kita terima ke depan.

Jadi data tentunya ini yang dibutuhkan terutama terhadap *lifting*. Tadi kami berharap sekali Pak Menteri ya melalui Pak Menteri tentunya penugasan terhadap pengumpulan data untuk meyakinkan kita sebagai pemangku kepentingan di dalam mengambil keputusan bersama, bukan keputusan sebelah pihak tapi keputusan bersama-sama. Sehingga yakin kita saling meyakini bahwa inilah dia barangnya.

Saya pikir itu saja, mohon maaf, terima kasih.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Nasril Bahar.

Sebelum saya lanjut ke meja Pimpinan, ada tambahan lagi dari rekan-rekan Anggota Komisi VII?

Kalau tidak ada saya persilakan Pak Bambang Haryadi.

F-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (H. BAMBANG HARYADI, S.E.):

Baik,

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII dan juga Anggota Komisi VII serta Pak Menteri ESDM beserta seluruh jajaran.

Kami Belum lama ini telah melakukan kontestasi Pemilu Pak. Kami hadir kembali ke Komisi VII ini mewakili daerah pemilihan, ada tiga hak yang harus Bapak tahu yang melekat pada diri Anggota DPR. Kami punya fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Karena hari ini terkait asumsi kami bisa menjalankan fungsi hak konstitusional kita adalah menerima atau menolak, itu saja, tidak ada hal-hal yang lain. Nah, tapi untuk itu sebelum kita ambil keputusan ataupun kesimpulan, kami ingin mengimplementasikan apa yang menjadi mandat Undang-Undang terhadap kami, yaitu hak untuk memperjuangkan Dapil *kan*.

Ada beberapa hal yang saya kritik di sini adalah terkait program-program yang sangat diharapkan oleh Daerah Pemilihan, misalnya PJUTS. Di sini di program 2025 ini sama sekali tidak ada, *kan* PJUTS terkait ini. Apakah ini ada kaitan dengan permasalahan PJUTS yang sedang di proses penyelidikan di Bareskrim Polri *kan*? Sebaiknya masalah hukum jangan sampai menghilangkan program ya. Silakan hukum berproses, kami dukung kalau perlu kami Komisi VII akan bersurat ke Bareskrim, lidik sampai tuntas, tangkap pelakunya kalau memang ada unsur korupsi. Tapi program tetap harus jalan, jangan karena ada masalah hukum *project*-nya ditiadakan *gitu* loh.

Ini *project* untuk rakyat, rakyat sangat butuh ya. Maka itu kami, kami akan dengan Pimpinan yang lain akan bertanya ke Dir Tipikor, bagaimana proses penyelidikannya *kan* terkait kasus PJUTS yang sedang dilidik *gitu*, kami minta dituntaskan *gitu*. Terus jangan hanya karena ada masalah hukum satu program, program yang baik untuk masyarakat. Kalau kami intinya untuk memperjuangkan aja Pak *kan*, enggak ada kami ini kok embel-embel mau minta ini. Kami minta asas manfaat untuk di Daerah Pemilihan kami *kan*, itu satu.

Terus kedua terkait penganggaran, karena kami adalah menjadi tanggung jawab kami *kan*. Beberapa yang waktu yang lalu ada di sini penganggaran Cisem, ada pergeseran anggaran ya mumpung ada Pak Menteri. Saya sampaikan, saya protes ke Sekjen Bapak ini *kan*.

Saya sampaikan, anda sudah baca belum Permenkeu Nomor 62 tahun 2023 ya. Jangan anda akal-akalin Pimpinan Komisi VII mengatas namakan Pimpinan padahal belum pernah ada persetujuan terkait pergeseran anggaran tersebut. Saya *kan* kasihan teman-teman saya, ini secara tidak langsung mereka ditipu.

Ini anggaran negara Pak, kalau ada salah-salah kita yang ikut bertanggung jawab, tuh. Jadi buat kami tolong setiap kita pembahasan kita ikutin mekanisme yang ada, program yang sudah baik jangan dihapus *kan*, jangan dihilangkan terlebih kalau ada masalah-masalah tertentu karena masyarakat yang butuh *kan*. Kalau ada salahan prosedur itu tanggung jawab yang melaksanakanlah *kan*, masyarakat jangan jadi korban, *gitu*.

Ja, terus yang kedua adalah terkait *lifting*. Karena ini pembahasan dari tadi adalah hampir menyeluruh dari hampir semua fraksi *lifting* kami alangkah eloknya juga terlebih lagi janji Presiden terpilih waktu kampanye ingin mengurangi impor BBM dan ini tidak selaras dengan ingin keinginan pemerintah besok. Ketika *lifting* tiap tahun turun, bahkan ini saya bikin perbandingan di dalam APBN 2023.

Kita tetapkan 660 target *lifting*, 660.000 BPOPD di dalam APBN asumsi APBN 2023, *sorry*, target yang kita capai karena di sini tidak disampaikan Pak, biar saya yang bacakan. Karena kalau disampaikan akan kelihatan jomplang *kan*. APBN 2023 itu 660 tercapai 6050,5, nah realisasinya di APBN 2024 kita sama juga salah lagi, 635 ini *outlook*-nya kira-kira 6595, meleset lagi pak *kan*. Jadi buat kami, kami tidak ingin mengulang terus-terusan kesalahan.

Jadi pertanyaan kami di dalam diskusi tadi panjang lebar di dalam kita besok akan melakukan RDP pendalaman, bahkan besok Pimpinan DPR Pak Rachmad Gobel mau ikut rapat dengan kami siang. Mohon izin Pak Menteri *kan*, besok kami akan ke dengan SKK Migas dengan Pertamina, Dirut Pertamina, Pertamina Hulu energi dan Pimpinan DPR *kan*. Jadi terkait asumsi ini kita sering sekali melesetnya enggak jauh-jauh Pak, enggak dekat, jauh *kan*, terutama soal Migas *kan*. Jadi 60, 660 realisasinya ternyata 605 ada meleset sekitar 55 *kan*, 635 ke 590 masih meleset 595, 35 lagi Pak, eh 40 lagi.

Nah untuk itu kita ingin mencari tahu, saya sepakat dengan tadi Pak Nasril, kita *pengin* cari tahu apa sih masalahnya *kan*. Kami mendengar banyak hal lah *kan* kait berkaitlah ini. Kalau tadi Pak Nasir bilang itu ada benarnya juga. Kami mendengar ya *kan* ada intervensi pengadaan barang jasa *kan*, akhirnya menghambat proses pemutakhiran peralatan, ada indikasi tidak *fair kan*, ada penaruhan spec yang khusus ya. Makanya besok kita akan bedah, kalau perlu kita akan bikin *live* semua biar bisa melihat semua Pak *kan*, biar ketahuan siapa malingnya, siapa yang bermain *gitu*. Jadi kita, target kita niat kita semua sama ingin menaikkan *lifting* tapi jangan sampai ini karena permainan-permainan di bawah ini mengganggu.

Jadi harapan saya di pemerintahan berikutnya *lifting* Migas itu benar-benar kita genjot habis pak. Jadi kalau 2030, 1.000 *barel per day*, itu saya pikir sangat jauh sekali Pak kalau kita tidak merubah sistem dan. Jadi sistem yang terbaik adalah bagaimana kita menggali terkait hal-hal yang ini, yang sistemik ini *kan* terja permasalahan-permasalahan baik di dalam sistem rekrutmen SDM mungkin juga. Tapi *kan* kalau kami melihat ya kami mendengar laporan-laporan *kan*, kami mendengar lebih kepada soal teknis *kan*, ya teknis pengadaan *gitu kan*, teknis rekrutmen. Nah inilah yang kita harus benar-benar ikut awasin *kan*.

Jadi menurut kami, penentuan *lifting* di dalam asumsi 2025 kita akan dalami dalam rapat dengar pendapat yang akan kita mulai, mulai besok Pak. Dan insya Allah saya yakin Pak Menteri juga tujuannya sama dengan kami bahwa kita ingin bekerja untuk masyarakat dan bisa dinikmati masyarakat sebesar-besarnya *kan* dari sektor ESDM ini.

Dan mudah-mudahan juga dari sektor ESDM ini bisa menyumbang APBN *kan*. *Kan* salah satu sumbangan APBN kita da, dari sektor ESDM itu cukup besar Pak *kan*, baik minerba, Migas *kan*. Tapi kami punya kepentingan, kebetulan kami dari fraksi yang akan ikut melakukan pemerintahan besok. Jadi kami harus mengawal *kan* bagaimana presiden besok bisa mengimpementasikan janji politiknya, pengurangan terhadap BBM impor *kan*. Berarti *kan* kalau dikurangi impornya *kan* berarti harus dinaikkan produksinya Pak ya. Kalau ini salah satu ingin mengurangi impornya sedangkan penggunaannya semakin banyak tuh.

Jadi untuk itu Pak, kami berpandangan bahwa fraksi kami, Partai Gerindra ingin melaku dilakukan pendalaman terlebih dahulu terhadap semua program, terutama program-program di daerah pemilihan yang sudah biasa berjalan Pak, PJUTS termasuk, apa, AML *kan*, karena kemarin rakyat ini banyak yang masih nunggu Pak.

Bahkan ini buat catatan Pak Menteri ini karena Dirjen Mi, Dirjen apa, Gatrik ya, yang kemarin ya, ini Pak Dirjen nih karena ini banyak bercanda jadinya kita ini. Saya tadinya mau marah Pak, karena saya kaget Pak, kami ini di Kabupaten Dapil saya Jember, Lumajang, itu malah enggak dapat Pak, di Lumajang-nya.

Eh ujuk-ujuk tetangga sebelah, Banyuwangi ini, *ujuk-ujuk, blek blek*, melebihi kita, bahkan yang paling kami pukulan waktu paparan salah satu Direktornya di Jember. Makanya saya diprotes warga Jember, ada kabupaten separuh dari Kabupaten saya, dia nerimanya lebih gede dari kabupaten saya, saya enggak tahu mekanismenya gimana itu.

Jadi itu pak ya, terima kasih Pak Ketua. Mungkin dari Fraksi Gerindra mungkin itu saja.

*Wabillahi taufik walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhi.*

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Bambang Haryadi.

Dipersilakan Pak Maman Abdurrahman.

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T):

Test.

Makasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,
Salam sejahtera Pak Menteri dan rombongan.

Saya, saya nih sebetulnya, terus terang Pak saya mau dua hal aja sih. Tapi sebelum saya masuk ke *lifting*, saya mau bicara yang mengenai subsidi LPG 3 kilo. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan di RDP kita dengan Pertamina. Nah ini saya mau ingatkan lagi biar kita punya satu kesepemahaman *frame* yang sama. Jadi begini, sampai kapanpun kalau sistem el subsidi LPG kita ini masih seperti ini. Saya ulangi dulu saya sering sekali menggunakan analogi yang sama nih, sederhana tapi simpel. Kita tuh akan jadi seperti orang yang lari berputar-putar di dalam sebuah *velodrome*, tak berhenti Pak, sampai pada satu titik yang kita tidak mengerti siapa yang dikejar, siapa yang mengejar.

Situasi subsidi LPG ini seperti itu sekarang. Jadi kita terus hari berputar-putar tuh dalam sebuah Velodrome nih sampai akhirnya kita pusing sendiri dan kita enggak ngerti, ini saya yang ngejar Pak Menteri atau Pak Menteri yang ngejar saya nih, karena terus mutar-mutar sudah, sudah enggak tahu mana *start* nya, mana *finish* nya, mana ujungnya, mana awalnya *gitu*.

Nah ini kondisi itu yang terjadi Pak, artinya begini ini di hadapan publik, kemarin saya juga diwawancara di salah satu stasiun TV saya bilang, hari ini perdebatannya bukan masalah kita mau naikkan LPG, eh mau naikkan subsidi atau mau turunkan subsidi. Tapi sekarang sebetulnya proporsi kebutuhan hari ini seperti apa terkait subsidi energi ini. Karena begini Pak, mau kita naikkan volume subsidinya atau mau kita turunkan volume subsidinya permasalahannya akan terus sama.

Coba deh, kita maki-maki, kita marahin Pertamina, kita buang badan ke aparat, aparat enggak serius nih mengontrol, terus kita kritik ESDM, wah ESDM nih begini begini enggak beres Pak, kita salahkan BPH Migas. Jadi hari ini semua saling menyalahkan, terus rakyat nyalahin Komisi VII Pak, wah ini Komisi VII enggak, jadi akhirnya itu kondisi itu yang terjadi.

Artinya usulannya begini, penegasan saya terkait subsidi ini, berapapun nanti volume yang kita putuskan mau kita naikan atau kita turunkan atau kita tambahkan, harus ada kesepemahaman dulu di antara kita Pak bahwa ini adalah solusi sementara, itu Pak penegasannya, ini adalah solusi sementara. Solusi permanennya apa? perubahan metode subsidi, *gitu* Pak. Karena hari ini *kan* kita menggunakan metode subsidi terbuka, penyelesaian solusi permanennya adalah merubah menjadi subsidi tertutup.

Ini nara, isu ini sudah kita angkat dari kurang lebih 4, 5 tahun yang lalu. Nah artinya apa pak, perbedaannya dimana, kalau subsidi terbuka yang kita subsidi itu tabung LPG-nya, tapi kalau subsidi tertutup kita kembali kepada *hitohnya* subsidi. Subsidi itu *kan* sebetulnya secara substansi memberikan kemampuan yang tadinya orang tidak punya kemampuan atau daya beli menjadi punya daya beli, jadi manusianya yang kita subsidi Pak.

Akhirnya kalau dengan subsidi terbuka teori hukum alam Pak, ada dua produk yang sama tetapi memiliki harga yang berbeda, ya akhirnya orang akan pilih harga yang murah. Jadi kita mau marahin publik sampai kapanpun mana yang berhak mana yang enggak berhak enggak akan mungkin sanggup kita.

Jadi saran saya konkritnya adalah merubah metode subsidi dari yang tadinya subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup. Jadi jangan kita terjebak Pak, mau dinaikkan kah, mau diturunkan, mau naikkan berapa pun silakan aja, enggak ada masalah, yang penting metode subsidinya kita revisi, kita benahi *gitu* loh. Itu yang menurut saya kalau masalah LPG.

Nah lalu Pak, tadi saya sampaikan tolong ini administrasi aja nanti penyampaian presentasinya tambahkan berapa nilai *value* angkanya dari ben, dari ben, apa, dalam bentuk rupiah. Ini *kan* kita sampai hari ini cuman tahu bahwa volume LPG 3 kilo total 8 juta metrik ton. Nah kita mau tahu itu berapa

angkanya dalam bentuk rupiah. Jadi minta tolong dipresentasikan aja nanti sama teman-teman ESDM.

Jadi usulan konkret saya terkait subsidi LPG ini tolong kita harus punya kesepemahaman yang sama bahwa ini adalah solusi sementara, solusi permanennya adalah merubah metode subsidi. Nah baru *next step*-nya tadi itu Pak, ada isu besarnya dari pemerintah *current account deficit* karena *kan* kita impor nih pak LPG. Nah itu apa di itu sebetulnya satu-satunya jalan, yaitu mengkonversi penggunaan LPG kita yang impor itu kita geser menjadi penggunaan DME. Tapi saya pikir itu nanti *next, next term*-nya, tapi monggo itu menjadi perdebatan kita sama-sama.

Nah lalu yang kedua Pak masuk ke *lifting* Migas. Saya harus sampaikan saya setuju dengan teman-teman semua, tadi saya coba dalam narasi teman-teman semua. Pak, kebanggaan kita Komisi VII ini itu sebetulnya hanya ada di asumsi dasar dan asumsi makro ini Pak itulah tupoksi Komisi VII yang sebenarnya. Dan juga mungkin saya pikir itu menjadi tupoksi SKK Migas dan ESDM. Sampai hari ini kalau mau ditanya apa sih keberhasilan Komisi VII dan Kementerian ESDM? saya harus sampaikan enggak ada Pak kalau basisnya adalah pendekatan asumsi makro. Karena sampai hari ini kita belum mampu menaikkan produksi Migas kita.

Nah narasi besarnya adalah 1 juta barel tuh pak, itu mimpi kita bersama Pak. Tetapi kalau melihat tren seperti ini kita khawatir mimpi besar 1 juta *barrel* itu di tahun 2030 sulit untuk kita dapat. Nah saya rasa setuju pada teman-teman, eh tadi usul dari teman-teman, perlu ada pendalaman sebelum kita menyetujui ini. Artinya kita perlu dalami, kita perlu bedah bersama, ini bagaimana sih.

Pertama, 1 juta barel *tu* apa yang mau dilakukan, tren ke depan. Jadi sebelum kita menyetujui ini kita harus bicara dulu nih dalam satu dua hari ini sampai ke depan ini kita mau ngapain, masa kita mau terjebak terus nih pak kayak begini Pak. Sekarang realisasi mohon maaf *outlook*-nya 595.000 barel, target kita APBN 635, berarti turun kurang lebih sekitar 40.000 barel.

Berarti prediksi saya 2025 misalnya tarolah kita ketok 600.000 ya Pak ya, kita ketok ya 600.000 barel, ya bisa turun lagi tuh Pak jadi 580, 560.000 barel. Kita ketok lagi pak 2026 Pak, turun lagi pak 570.000, turun lagi *tu* pak 550.000. Jadi kayaknya ini gak boleh ada target Pak karena setiap ada target dia turun lagi dari target *gitu*.

Nah maksud saya konkretnya, *kan*, saya mengusulkan kepada Pimpinan, saya pikir sebelum kita bicara di sini kita lakukan pendalaman khusus terkait masalah *lifting* migas ini karena ini masalah isu nasional kita dan menjadi sangat penting untuk kita bedah bersama.

Sekarang target kita 1 juta barel 2030 bagaimana *reserve*-nya? langkah kita untuk menemukan cadangan barunya seperti apa? Lalu setelah kita dapat cadangan baru itu kapan bisa kita realisasikan? Sebagai contoh saya agak terkejut nih pak, terus terang tadi sebetulnya saya enggak mau terlalu ini,

karena saya berpikir *lifting* gas kita agak oke, tapi ternyata di sini turun juga *lifting* gas kita. APBN-nya 1 juta, eh 1 juta barel *equivalent*, di sini *outlook*-nya 993 juta barel *equivalent*. Berarti yang tadinya gas itu bisa menjadi pengganti peliput lara kita dari produksi minyak kita sekarang turun juga gasnya, nah ini kan lampu kuning nih Pak.

Jadi saya pikir Pak Menteri usulan konkret saya, saya setuju dengan teman-teman, kita minta kepada teman-teman sekam sekretariat untuk buka pendalaman lebih lanjut terkait mengenai, apa, *lifting* minyak dan gas kita. Artinya, seperti apa sih kondisinya gitu loh, saya rasa *gitu*. Jadi dari aspek operasi, aspek perencanaan, lalu aspek *supply chain*-nya seperti apa karena itu saya rasa perlu kita dalamin.

Saya rasa itu Pimpinan sebelum kita menyetujui dua hal itu aja mungkin yang saya kritisi.

Makasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak Maman Abdurrahman.

Ibu Bapak kalau memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan oleh Anggota, saya izin pada Pimpinan Anggota untuk bisa menyampaikan juga satu dua hal terkait pembahasan kita pada siang hari ini.

Pertama, Pak Menteri dengan jajaran yang kami hormati.

Saya sebelum terjun ke politik, saya 20 tahun berada di sektor keuangan perbankan dan perbankannya itu semuanya di perusahaan asing, Pak Menteri. Di sana kami mengenal apa yang namanya *carrot* dan *stick* *gitu*. Bahkan *stick*-nya itu tegas sekali Pak, nah tetapi *carrot*-nya juga diberikan pada saat kita mencapai sesuatu. Nah ini saya kira untuk sektor migas kita ini harus diberlakukan *carrot* dan *stick* yang konsekuen juga Pak *gitu*.

Menurut saya itu sangat penting karena jangan sampai hanya sekedar kita menetapkan target, target tidak bisa tercapai, kita tetapkan target baru *gitu*, tetapi *stick*-nya mana *gitu* Pak. Jadi tidak ada insentif dan disinsentif, ketik ketika kita mencapai target atau gagal mencapai target tersebut. Sementara ini kan kita menyangkut hajat orang banyak Pak, kebutuhan Migas itu termasuk beban impor yang semakin besar yang harus kita kemudian jalankan dan lain-lain. Jadi saya kira, saya kira itu sangat penting Pak sebagai tambahan bagi saya atas apa yang disampaikan keprihatinan teman-teman di Komisi VII.

Kedua Pak terkait masalah kegiatan kita di sektor hulu Migas. Saya pikir sektor hulu Migas memang kita butuh investasi yang besar dan banyak sekali kita mengajak pemain-pemain internasional yang besar untuk masuk ke sektor hulu Migas untuk kita kembangkan blok-blok Migas yang memang perlu di yang layak dikembangkan. Tetapi Pak sebagaimana halnya yang sekarang terjadi di sektor pertambangan kita pemerintah memberikan *affirmative policy*, kebijakan

afirmasi kepada Ormas keagamaan, berikanlah juga *affirmative policy* kepada pengusaha Migas dalam negeri Pak, terutama di sektor hulu.

Kalau kita semata-mata hanya melihat *size*, ukuran, kemampuan finansial, latar belakang pengalaman yang memang dimiliki oleh pengusaha internasional yang notabene nya tidak mungkin ditandatangani, di, ditandingi oleh pengusaha domestik, pengusaha domestik kita ya akan begitu-begitu saja Pak.

Jadi dalam kesempatan hari ini, kesempatan ini, saya himbau kepada Bapak-Bapak terutama di Direktorat Jenderal Migas ya, Pak Direktur Hulu Migas juga ada di sini, tolong Pak berikan itu juga ada dukungan khusus *affirmative policy* untuk teman-teman kita di sektor migas yang berasal dari pengusaha dalam negeri.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.

Ibu Bapak kalau tidak ada lagi saya kira kita semua sepakat ya bahwa perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait asumsi dasar sektor ESDM dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025.

Sepakat ya Ibu Bapak ya?

Jadi kita akan dalam lebih lanjut. Oleh karena itu saya kira sesi itu kita nyatakan ditutup untuk kemudian Bapak Menteri bisa melanjutkan dengan pemaparan terkait Pagu Indikatif Kementerian ESDM RI untuk Tahun Anggaran 2024.

Kami persilakan Pak Menteri untuk bisa melanjutkan.

Iya Pak?

Oh iya, baik kita perpanjang dulu untuk 1 jam ke depan.

Terima kasih.

(KETOK PALU 1 KALI)

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Terima kasih Bapak Pimpinan, Pak Eddy, Pak Maman selaku Pimpinan Komisi VII.

Bapak Ibu sekalian Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati.

Kami terima, telah terima seluruh masukan-masukan, ya tentu saja kita akan meresponsnya itu ya dengan, apa, dengan sangat terbuka dengan data yang ada. Dan pada waktunya akan disampaikan mungkin dalam pendalaman besok, akan bisa dijelaskan lebih *clear*.

Nah selanjutnya izinkan kami untuk menyampaikan pengantar RKA K/L Tahun Anggaran 2025, dimana rencana kerja Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 9,38 triliun. Namun sebagaimana Surat Bersama Pagu Indikatif atau SBPI dari Menteri Keuangan nomor S346/MK02/2024 dan Menteri PPN Kepala Bappenas nomor B201/D8/PP0403/04/2023 tanggal 5 April 2024, Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 Kementerian ESDM di tahun 2025 adalah sebesar 3,91 triliun yang bersumber dari dana rupiah murni adalah sebesar 3,13 triliun, kemudian penerimaan negara bukan pajak unit penghasil itu sebesar 282,01 miliar dan badan layanan umum sebesar 493,59 miliar.

SBPI Tahun Anggaran 2025 tersebut belum termasuk PNBP royalti minerba sebagaimana surat Menteri Keuangan nomor S168/MK02/2024 dan penjualan hasil tambang sebagaimana surat Menteri Keuangan nomor S238/MK.02 2024 yaitu PNBP royalti minerba sebesar 1,196 triliun untuk didistribusikan ke-6 Unit Eselon I Kementerian ESDM dan PNBP **...(suara rekaman terputus 2.10.34)...** **...(selanjutnya melihat & mendengar rekaman bersumber dari YouTube 2.07.56)...** penjualan hasil tambang sebesar 4,279, 4, 4,279 kurang lebih triliun digunakan untuk pembangunan pipa Cisem dan Dusem.

Rencana Kerja Kementerian ESDM tahun 2025 mempertimbangkan antara lain pemenuhan anggaran yang bersifat wajib antaranya seperti gaji, operasional kantor, PNBP dan BLU untuk unit dan alokasi anggaran fungsi pendidikan dan kemudian juga kegiatan agenda pembangunan. Sehingga distribusi pagu per unit organisasi adalah sebagai berikut:

Sekretariat Jenderal sebesar 565,7 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar 140,6 miliar, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebesar 4,828 triliun, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebesar 491,5 miliar, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara sebesar 742,1 miliar, Dewan Energi Nasional sebesar 63,78 miliar, BPSDM ESDM sebesar 654,04 miliar, Badan Geologi sebesar 994,6 miliar, BPH Migas sebesar 254,29 miliar, Direktorat Jenderal EBTKE sebesar 555,98 miliar, dan BPMA sebesar 94,12 miliar.

Sebesar 55,3% atau 5,19 triliun Pagu Indikatif 2025 dialokasikan untuk infrastruktur dan survei sumber daya alam antara lain pipa penyelesaian pipa cisem tahap dua antara Batang, Cirebon sampai Kandang Haur Timur dan Dumai – Sei Mangkei, kemudian ada bantuan pasang baru listrik untuk 100.000 ya? untuk 100.000 rumah tangga, kemudian PLTS penunjang, kemudian ada PLTS dan PLTMH dan PLTM, kemudian juga program mitigasi bencana geologi dan pos pengamatan gunung berapi.

Pagu Indikatif 2025 ini masih belum mengakomodir beberapa kegiatan prioritas antara lain pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga untuk 100.000 sambungan rumah, kemudian konkit petani 10.000 dan konkit nelayan 15.000 paket yang telah dibahas dalam *trilateral meeting* antara Bapenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.



Untuk itu kami mohon dukungan dari Komisi VII DPR RI dituangkan dalam risalah rapat hari ini dengan usulan tambahan anggaran bersumber dana rupiah murni sebesar paling tidak Rp1,2 triliun, ini belum termasuk PJUTS yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang Haryadi ya dan juga ini juga belum masuk mengenai Lides, ya Lides ini rencananya masuk di dalam usulan untuk PMN.

Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi VII,

Inilah gambaran mengenai usulan RKA K/L kami di tahun 2025. Kalau boleh juga kami sampaikan, sisipkan satu hanya pesan saja bahwa kami ingin melaporkan perkembangan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional. Jadi Undang-Undang Nomor 30, 2007 tentang Kebijakan Energi Nasional ya pada pasal-pasal yang mengamanatkan bahwa kebijakan energi nasional ditetapkan pemerintah dengan persetujuan DPR RI.

Jadi progres penetapan RPP KEN sampai dengan saat ini adalah telah dilaksanakan FGD, kemudian juga dilaksanakan pengharmonisasian Menteri Kumham melalui surat nomor PPE PP 03031186 tanggal 4 Juni, kemarin ini ya telah menyampaikan RPP KEN kepada Menteri ESDM untuk proses lanjut. Nah sesuai dengan arahan Sekretariat Negara, Menteri ESDM diminta untuk menyampaikan hasil tersebut kepada Komisi VII DPR RI. Untuk itu nanti perkenalkan kami untuk bisa menyampaikan drafnya untuk menjadi pertimbangan untuk ke tindak lanjut selanjutnya.

Demikian Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi VII DPR RI terkait dengan agenda yang kedua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ibu Mercy, silakan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Baik, terima kasih Pak Pimpinan, Pak Menteri dan jajaran.

Khusus untuk Pak Menteri, terima kasih untuk penjelasan yang berkaitan dengan komposisi anggaran K ESDM Tahun 2025.

Kurang lebih 55,3% atau sekitar 5,19 T dari 9,39 T usulan rencana anggaran dialokasikan untuk infrastruktur masyarakat. Dan dari 5,19 T, 4,2-nya itu khusus untuk pipa Cisem dan Dusem. Jadi hanya tertinggal 1 T sekian untuk semua program yang lain, padahal kita mau bicara tentang Lides, kita mau bicara yang lain-lain.

Jadi sebelum kita bicara soal angka besar, kalau saya enggak tahu ya artinya di bagian pipa gas bumi ini dengan Pimpinan-Pimpinan kalau mungkin sudah dibicarakan, maka untuk program yang lain harus 2 sampai 3 kali lipat dari angka yang ini, baru realistis kita bicara tentang kepentingan program masyarakat.

Tidak mungkin kepentingan masyarakat dikalahkan oleh kepentingan pipa walaupun memang kalau jadi targetnya juga untuk kepentingan masyarakat. Tapi kalau ini semua diserap di sana, Ini hari ini kita bicara ini dengan hati bersih, hati terbuka, kita coba cari solusi Pak. Kita tidak coba mengganggu yang ini tetapi mungkin kita coba cari solusi untuk meningkatkan tambahan anggaran, baru kita bisa bicara semua program prioritas yang lain.

Untuk program PLTS, PJUTS saja misalnya, kita juga belum dapat kejelasan, bagaimana program luncurnya di tahun ini, uang dari mana itu program luncur yang tahun kemarin katanya sudah tidak ada lagi anggaran.

Ini kita butuh klarifikasi teknis supaya kita tahu bahwa program PJUTS yang mau dijalankan tunggakan dari tahun yang lalu sebagai *carry over* ya dari tahun lalu masuk ke tahun yang sekarang ini, itu diambil dari tahun anggaran yang baru ini ataukah bentuknya bagaimana ini kita butuh kejelasan, supaya kita *clear*.

Kalau diambil dari tahun yang baru ini tambahkan yang lama lalu ditambahkan dengan yang baru hitung 2 kali lipat, baru *fair*. Karena yang lama itu tunggakan, kita dikejar-kejar sampai dengan hari ini.

Jadi itu yang paling pertama khusus untuk program masyarakat yang berkaitan dengan PJUTS, karena saya lihat PJUTS di sini dari tadi saya cari di mana ya kok enggak kelihatan, enggak ada. Padahal mestinya tanggung jawab yang paling pertama selesaikan ini tunggakan. Kemarin rapat-rapat sebelumnya pernah kita menyampaikan dulu waktu berkaitan dengan program sumur artesis, begitu programnya gagal dan bermasalah di hampir satu Indonesia Raya, Pak Maman sampai ngamuk-ngamuk waktu itu, tidak ada solusi sesudah itu.

Kita tuh di daerah itu sampai dilapor ke DPRD Kota Ambon, dilapor ke beberapa DPRD Kabupaten dan ke kepolisian, gila enggak? Padahal untuk sesuatu yang tidak kita kerjakan. Subkon juga kita enggak tahu siapa yang mengerjakan dan sebagainya, ini contoh aja. Dan untuk PJUTS yang tunggakan ini mesti masuk nomor satu dulu, yang lain dihilangkan, mesti masuk dulu di sini, ini kita kejar. Karena ini PR beban moral kita ke masyarakat.

Bagaimana caranya ini masuk dulu yang lain boleh dilepas tapi yang PJUTS harus masuk. Iya, jangan ditiadakan, karena ini kepentingan bersama kita yang sudah kita sepakati kemudian di tiadakan secara sepihak. Aduh saya sudah tidak tahu lagi bagaimana untuk berhadapan dengan masyarakat dan itu banyak titik distribusi yang berkaitan dengan PJUTS.

Dan ternyata bukan saya aja dan rupa-rupanya Pak saya ngecek ke beberapa kawan-kawan ada yang sudah selesai, ada yang selesai sebagian, ada yang tidak selesai sama sekali. *Why?* Kenapa kita didiskriminasi? Kenapa? Mestinya daerah-daerah 3T, daerah-daerah yang sulit diselesaikan duluan.

Setiap kali kita tanya karena daerahnya sul sulit, daerahnya jauh. Aduh sedih banget kita enggak minta kita tinggalnya di sana, lahir di sana sebagai warga negara di Indonesia Timur. Ini *taken for granted*, Tuhan sudah atur. Ini saya ngomong ini ni karena kesedihan aja Pak bukan karena saya marah Bapak tidak. Tapi karena ini betul-betul dari hati yang paling dalam.

Waktu Bapak jadi Dubes Jepang, waktu itu saya wakil Ketua Pansus Kelautan ya, eh Provinsi Kepulauan, kita pergi di sana. Apa kebijakan Pemerintah Jepang untuk daerah-daerah 3T? Beliau masih Pak Dubes. Untuk Jepang, daerah 3T diselesaikan paling pertama dengan mereka punya Undang-Undang yang sangat luar biasa dan harus berkualitas berkali-kali lipat dari daerah non-3T supaya tidak bolak-balik untuk perbaikan dan seterusnya.

Kalau kemudian ada kontraktor yang melakukan di luar aturan Undang-Undang itu, itu masuk tindakan subversif, pelanggaran terhadap menjadi kriminal negara sampai setingkat itu Undang-Undang nya. Sementara di kita, semakin jauh semakin terjadi pengabaian.

Bapak, kami sangat memohon Bapak. Begitu kita duduk, saya pulang dari proses Pileg Pemilu kemarin, begitu nanya-nanya soal program-program yang, sedih saya minta ampun. Saya bilang kenapa kita daerah-daerah jauh kenapa selalu yang dikorbankan, semakin agak kedekat, oh Ibu Mercy sekitar 50%, saya baru 10%, kita sudah sebagian.

Ada yang sampai ngomong, oh Ibu Mercy belum ada satu pun yang terpasang ya, sedih banget *gitu* loh Pak. Kenapa yang lain dipasang dan yang lain tidak? Nah ini saya tanya resmi atas dasar kebijakan apa kemudian terjadi perbedaan, terjadi diskriminasi dalam pelayanan bagi kepentingan masyarakat? Atas dasar apa? Kebijakannya karena apa? Pertimbangan apa? Toh kita mengambil keputusan, kita semua ambil keputusan bersama-sama, berdarah-darah, kita semua mengawal ini, program ini sampai di Banggar.

Begitu diimplementasikan, kenapa terjadi diskriminasi? Saya tanya ini sudah empat kali dalam sejumlah pertemuan yang berbeda-beda Pak. Hari ini di hadapan Bapak saya sangat memohon ada kesetaraan di dalam implementasi kebijakan program bagi kepentingan masyarakat.

Yang berikut untuk program PLTS *rooftop*. Untuk program PLTS *rooftop* Pak Pimpinan, Pak Menteri dan semua jajaran, cukup sedih rata-rata program *rooftop* itu banyak yang menolak karena tidak digandeng dengan baterai. Dan rata-rata kita tempatkan itu, itu di rumah sakitnya. Kalau tidak ya punya, apa, Alfatah ataukah punya PGI, punya Gereja Protestan Maluku, yang kayak *gitu-gitu* karena itu mereka untuk pelayanan publik daripada kita kasih ke Pemerintah yang uangnya sudah banyak. Tapi akhirnya mereka berat hati sekali akhirnya mau terima itu hanya yang GPM.

Kalau lampu kemudian, apa, lampu padam maka *rooftop* menjadi tidak berguna karena enggak ada baterainya. Terus guna apa kita bikin program ini Pak? Kalau kemudian PLTS *rooftop* ini kita hanya berikan setengah hati *gitu* loh, tanpa baterai Jadi saya sangat berharap untuk yang PLTS *rooftop* itu kita evaluasi menyeluruh, sebaiknya digandeng dengan baterai supaya ada penyimpanan baterai, lampu padam mereka bisa ambil dari baterai. Ini *kan* kegunaan kita bikin *roof* bikin PLTS, ini *kan* kegunaan karena ada baterai, *storage base*-nya ada, kenapa baterainya dihilangkan?

Yang kedua itu izin, untuk pelaksanaan atau apakah *clearance* untuk sudah mulai bisa diimplementasikan. Dari sejak selesai itu Pak, saya enggak tahu sampai tahun depannya itu baru kita bisa dapat izin. Padahal program ini, program tahun berjalan sebelumnya. Sampai saya bolak-balik WA, telepon memastikan bahwa *please* Bapak tolong dibantu supaya dari pihak, apa namanya, rumah sakit dan sebagainya mereka nanya, ini gimana kok itu izin, apakah namanya ya teknis kali, kenapa belum keluar *gitu*.

Walaupun pada akhirnya keluar tetapi tidak sesuai waktu, tenggat waktu yang kita sangat harapkan. Mestinya begitu pemasangan selesai izin, pemeriksaan tuntas, izin langsung dikeluarkan. Bukan berlama-lama dan akhirnya muncul kerumitan birokrasi yang lain padahal ini kepentingan untuk masyarakat dan bukan untuk bisnis, bukan untuk *profit oriented*.

Yang berikut untuk program BPBL. Untuk program BPBL saya kira gumulannya hampir sama untuk kita semua Pak, ini catatan yang tidak mudah. Kemarin kita semua mendapat angka 7.500 sekian. Kami karena di wilayah-wilayah yang sangat sulit, kemarin saya tidak bisa memasukkan sampai dengan 7.500, mungkin sekitar 5.000 sampai dengan 6.000. Informasi yang paling terakhir kita dapat, Bu Mercy hanya cuman bisa sekitar 2.500 dan itu hanya lewat WA dan telepon, padahal waktu kita bahas di sini resmi.

Mestinya ada surat resmi yang masuk ke Komisi VII bahwa dari 7.500 alokasi per setiap Anggota hanya bisa 2.500 atau hanya bisa 1.000 atau hanya bisa sekian. Ternyata ketika kita tanya masing-masing Anggota ada juga perbedaan perlakuan, minta maaf . Ya kalau perbedaan karena ada Pimpinan dan lain-lain enggak apa-apa. Tapi yang sesama Anggota juga ada perbedaan angka.

Saya bilang gila nih, masyarakat sampai di bawa. Begitu bertanya, Bu Mercy kok rumah miskin yang sana dapat, kok rumah kami lebih miskin di sini kita baru saja pasang program yang dari PLN ya. Ya program yang dari Pak Dirjen Kelistrikan program BPBL itu kok tiba-tiba, apa namanya, yang satu dapat, yang lain tidak dapat. Atas ini gima, gimana ya saya mohon penjelasan.

Data yang didapat, data yang didapat dari dari pihak kementerian, pihak Dirjen bahwa ada yang punya masalah KTP lah, ada yang punya masalah apa dan seterusnya lah kayak *gitu*. Kemarin angkanya itu ada berapa ribu lah ya tidak sampai dengan, *sorry*, program AML, saya *sorry*, program AML 7.000 menjadi 7 hanya sekitar 2.500, ini yang kemudian menjadi persoalan.

Dan tarik-tarikan persoalan antara data verifikasi PLN dengan dari data kantor pos karena yang verifikasi semua PLN. Saya sampai bilang pihak PLN, kenapa data yang keluar ini hanya sekitar angka ini, apakah memang kuota yang diturunkan dari pihak Dirjen angkanya sebegitu sehingga PLN hanya memverifikasi yang sebegitu aja. Ini saya juga tidak tahu ya pihak mana yang kemudian harus kita salahkan, tapi saya kira administrasinya ini mungkin harus kita perbaiki untuk yang AML. Saya enggak tahu di 2025 AML masih masuk lagi atau tidak ini.

Sementara untuk yang program BPBL. Program BPBL ada Anggota dapat 7.000. Saya enggak perlu buka siapa orangnya. Saya sangat-sangat sedih karena pertarungan sangat keras untuk program BPBL ini, minta tambah sudah susah. Sementara kita baru tahu bahwa di Maluku dan wilayah-wilayah 3T yang lain, apa namanya, infrastruktur kelistrikan baru mulai jalan di pulau-pulau.

Oh Ibu Mercy sudah enggak bisa lagi, sudah ditutup kita tidak bisa verifikasi lagi dengan ini. Begitu peresmian terus saya tanya, Pak kalau di wilayah ini. Oh iya itu Anggota ya dapatnya sekian ini dapat. Aduh saya sampai tahan napas.

Jadi saya mohon Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, mohon banget, kita semua yang duduk di sini setara. Kita berjuang sama keras untuk bisa kita datang di sini. Sebagian mewakili wilayah yang sudah makmur, sebagian mewakili wilayah yang masih miskin ekstrem. Maluku ini nomor 4 termiskin di Indonesia. Papua, Papua Barat, Maluku, apa namanya, NTT, Maluku nomor 4, tidak naik-naik. Karena apa? kebijakan yang jomplang-jomplang seperti begini.

Yang terakhir catatan saya, khusus untuk penanganan kelistrikan. Kita ni punya harapan besar. Listrik menjadi *prime mover* untuk pembangunan. Tetapi kalau misalnya untuk pengurusan kelistrikan yang terjadi, apa namanya, pembangkit-pembangkitnya sudah bisa jalan, masyarakat miskin yang ada di sana memang sangat mengharapkan dukungan dari Pemerintah.

Kami sangat mengharapkan Bapak-Bapak sekalian untuk mungkin bisa dibijaki dengan PLN. Jadi memang ada kantong-kantong yang miskin ekstrem, miskinnya tu ekstrem karena tidak ada uang berputar di Pulau itu, yang terjadi mereka sampai akhirnya barter, barter beras, barter makanan, barter ikan dan lain-lain, karena ekstrim seekstrim-ekstrimnya mereka enggak lihat duit. Karena apa? mereka tergerus oleh sistim, apa namanya, penadah hasil, *middle man* yang kerjanya ini enklaf-enklaf kayak *gitu*, sistem gugus Pulau.

Jadi berapapun mereka menghasilkan ikan, mereka menghasilkan tuna, menghasilkan rumput laut dan segala macam tetap mati hutang 9, 10 kali lipat terhadap penadah-penadah produksi ini. Mereka enggak pernah lihat hutang, bawa hasil berapa banyak pun. Bu Mercy, kita bayar listrik tidak mahal Ibu Mercy tetapi kita enggak lihat uang karena begitu hasil rumput laut kita, kita dapat kita enggak bisa jual Bu, *middle man* yang datang harga turun jauh. Mereka bawa sembilan bahan pokok dengan mereka punya kapal-kapal dan

segala macam itu. Masyarakat ambil, masyarakat kasih hasilnya. Enggak pernah lihat duit.

Jadi ini fakta-fakta kenyataan yang saya mau sampaikan kepada Bapak-Bapak berkaitan dengan masalah listrik sebagai *prime mover* ini. Bagaimana caranya untuk PLTM, apa namanya, pembangkit-pembangkit listrik yang didorong lewat Dirjen EBTKE, listrik terpusat, revitalisasi dilakukan. Ada beberapa perbaikan yang jalan dan ada juga yang baru di da sejumlah daerah 3T, waktu kita putuskan di anggaran yang tahun ini berjalan.

Berapa *watt* yang didapat per setiap rumah Pak, 230 watt, mau membangkitkan ekonomi gimana Pak? Enggak bisa. Saya sudah berkali-kali dorong termasuk di Panja kelistrikan, kalau mau kasih sesuatu kepada kami di wilayah-wilayah sulit, kasih yang sekaligus bisa mendongkrak ekonomi, tidak hanya untuk satu buah mata lampu, satu dua buah mata lampu, *kan* itu, tiga buah mata lampu, dua mata lampu dan satu itu untuk saklar, apa bisa ngecok, apa, *charging*.

Jadi kita enggak pernah bisa kemudian, apa namanya, dinamika ekonomi bisa berjalan dengan kuat, karena ini, kebijakan pembangunan yang jalan menganggap bahwa masyarakat miskin di wilayah 3T yang penting pelayanan minimum udah dapat mereka bisa lihat listrik, bukan itu.

Kita ingin sama dengan daerah yang lain. Kita ingin juga bahwa kita ekonomi bisa bertumbuh dengan pesat, tidak sekedar hanya mendapatkan jatah listrik yang *hard* yang hanya sekedar 230 *watt* didapat dari pelayanan terpusat seperti itu, PJU terpusat. Ini contoh-contoh kecil yang buat saya cukup banyak. Saya akhirnya harus bilang ya terjadi diskriminasi yang tidak sehat, lebih baik tidak banyak tapi satu kali buat agak besar. Masyarakat terima bisa dapat 700 *watt* atau sekian ratus watt. Mereka bisa bikin banyak hal Pak. Ini mungkin beberapa catatan karena kita mengevaluasi untuk APBN 2025.

Jadi saya kira itu, untuk PNM tadi teman-teman sudah memberikan catatan banyak. Kalau harus masuk di nomenklatur baru yang ada di sini pak maka ini juga harus bisa dibicarakan dengan Pimpinan Badan Anggaran. Saya takut kita masuk di sini, mereka potong juga yang ada di PLN. Padahal yang di PLN tidak cukup karena yang 2 tahun sebelumnya itu 10 T, dari 5 T naik 10 T karena kebutuhan yang begitu besar di daerah-daerah yang tidak punya listrik sama sekali.

Begitu tahun ini anggaran hilang, PLN gelontorkan 4 T, itu pun tidak cukup sampai di sebagian Kalimantan, Sumatera, perbatasan Maluku Utara, perbatasan Maluku, perbatasan NTT, perbatasan dengan Timor Leste. Ini iya, jadi harus ada penugasan untuk bisa mengkombinasikan alokasi PNM yang memang ada di PLN dan yang ada di kami nanti baru dilakukan penugasan.

F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI (SUGENG SUPARWOTO):

Mohon maaf, mohon maaf.

Ada PLN ini?

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Iya, terima kasih.

Ini mungkin catatan dari saya.

F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI (SUGENG SUPARWOTO):

Berasa PLN ini dibela, dibela habis-habisan ini.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Iya, mungkin itu beberapa catatan dari saya pak Ketua, Pak Pimpinan. Mudah-mudahan ini memberikan semacam inspirasi bagi kita semua untuk bisa melakukan sebuah kebijakan di periode yang baru nanti ini dengan lebih baik lagi bagi pelayanan masyarakat.

Sekian dan terima kasih.

Saya kembalikan kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Makasih Ibu Mercy atas masukannya.

Tentu kita maklumi, apa yang dirasakan Ibu Mercy yang berada di daerah 3T. Dan ini srikandi-srikandi kita ini yang berjuang Pak, bertempur nanti di Banggar Pak, nah tu. Jadi, Ibu Bapak jadi sudah disampaikan semua.

Bu Ratna, ya silakan Bu Ratna.

Kalau untuk Bu Ratna kita tidak mampu menolaknya.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Untuk yang kedua kalinya,

Kepada Bapak Ketua, Pimpinan serta sahabat-sahabat Badan Anggaran yang kami hormati,

Pak Menteri, Pak Dirjen, juga Kepala berbagai lembaga yang mewakili entitasnya masing-masing yang kami banggakan.

Tadi, sebenarnya Pak, sebenarnya, apa yang disampaikan oleh Ibu Mercy, itu sudah mewakili suasana kebatinan kami semua yang ada di sini, sebenarnya Pak. Cuman dalam kesempatan yang baik ini, saya merasa perlu juga untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi konsen kami sesuai dengan aspirasi yang ada di daerah pemilihan masing-masing, begitu.

Yang pertama Pak, kita buka bareng-bareng di halaman 21 ya Pak. Tadi sudah diulas sih sebenarnya bahwa usulan rencana anggaran dialosa, dialokasikan untuk infrastruktur masyarakat. Memang kalau dari rasio, besar Pak yang infrastruktur dan SDA *gitu*. Cuman *kan* di situ ada item Cisem ya Pak dan Dusem, yang kita tahu benerlah kalau ini tuh sebenarnya ke Dumai, Dumai-Sei Mangke kalau enggak salah ya Pak.

Ini *kan* proyek yang sangat ambisius dan hanya sedikit dari sebagian besar seluruh Indonesia yang merasakan. Saya sepakat bahwa ini merupakan semangat untuk bisa pemerataan energi dan lain sebagainya, sepakat Pak. Cuman kalau ini yang dijadikan prioritas sehingga, meng, menghilangkan item-item seperti PJUTS, konkit petani, konkit nelayan yang sebelumnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu perlulah kita mengkaji lagi Pak.

Maksudnya benar enggak sih ini *gitu*. Alangkah baiknya kalau ada penugasan. Okelah ini disebut sebagai proyek strategis nasional begitu, yang memang sepertinya Pak Presiden di akhir masa jabatannya ini mau enggak mau harus jadi *gitu*, seperti IKN lah ya. Ini kalau menurut pemahaman kami Pak dan kami ini juga melihat sehari-hari kondisi di daerah pemilihan masing-masing, cobalah ini kita telaah lagi.

Kita tahu semangat kita sama *kan* Pak, di tahun kemarin Cisem juga 3 triliun, sekarang segini lagi *gitu*. Ini sebenarnya buat siapa? Udah *gitu kan* judulnya aja untuk kawasan industri. Kita masih *bargaining* terus nih supaya masyarakat yang lain juga bisa ikut menikmati aja belum *clear*. Coba kalau ini dijadikan Jargas rumah tangga *gitu* sudah jadi berapa ribu rumah tangga ya Pak *gitu* loh. Itu *kan* lebih jelas *gitu* loh peruntukannya kalau memang kita mau meningkatkan infrastruktur energi yang ada di Indonesia *gitu* loh. Pertama itu Pak.

Yang selanjutnya, di sini banyak sekali kegiatan yang berjudul pengawasan pembangunan Migas, perencanaan dan Monev pembangunan EBTKE, mitigasi bencana geologi, pelayanan perizinan dan pemantauan air tanah yang setelah saya bagi Pak, nilainya itu lebih besar daripada pos pengamatan gunung api.

Kalau menurut pemikiran kami, apakah perencanaan, apakah Monev, apakah pelayanan izinan di Indonesia itu sudah sebegitu mahalnyanya *gitu* loh. Ini *kan* judulnya untuk infrastruktur masyarakat Pak, tapi ternyata di dalamnya

masih juga begini-begini aja *gitu* loh. Pak Menteri tolong dong Pak Menteri beserta para Dirjen dan jajarannya, marilah kita satukan frekuensi *gitu* loh.

Supaya kita itu bisa memberikan hal yang lebih *real*, apa sih yang dibutuhkan di masyarakat itu. Bapak *kan* juga punya petugas *kan* Pak, punya aparat sampai ke tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, bolehlah mereka itu ditanya *gitu* sebenarnya masyarakat di sisi ini butuh apa sih, di Indonesia timur butuh apa sih. Saya harapannya begitu Pak.

Masa ini pelayanan perizinan dan pemantauan air tanah yang kalau tidak salah itu sudah berpindah penugasan juga ke Kementerian PUPR. Saya enggak ngerti ya pembagian teknisnya seperti apa. Itu masih ada di sini lima kegiatan, 59,38 miliar. Saya hitung per kegiatan itu ada 11,87 miliar. Ini izin yang model bagaimana *gitu* loh.

Kami paham urgensi dari masing-masing unit yang telah dised, disiapkan dengan sedemikian rupa kami paham. Cuman kalau ini yang, dijadikan *bargaining* sehingga kami harus tutup mata terhadap hilangnya program PJUTS, hilangnya program konkit untuk petani dan nelayan, ya nanti dulu Pak. Kita mau berdebat sampai kapan nih? Seminggu? Dua minggu? Ayo *gitu*. Karena sebenarnya ini fungsi utama kenapa kami ada di sini hari ini begitu loh.

Bukan masalah elektoral ya Pak, karena terus terang di Pileg 2024 semua Anggota ini meng-amini bahwa program-program yang kita bawa ke daerah pemilihan itu belum tentu linear dengan perolehan kami, perolehan suara yang kami dapat *gitu*. Cuman kan ini merupakan bentuk *real* komitmen kami terhadap konstituen di Dapil itu sebesar apa *gitu* loh. Sehingga kami mohon Pak Menteri bahasa yang ada di kota kecil 9,39 triliun belum termasuk anggaran untuk Jargas, koma konkit petani dan nelayan.

Ini sebenarnya Bapak ngasih tugas khusus ya untuk teman-teman Komisi VII yang ada di Badan Anggaran *gitu* loh. Supaya gimana caranya kita ini bisa berdiplomasi, kita bisa bernegosiasi dengan bos-bos kita yang ada di sana, supaya ada tambahan sehingga kami bisa memasukkan untuk poin ini *gitu*. Janganlah Pak Menteri, tolong ini di sisir lagi sehingga apa yang diamanahkan oleh teman-teman tadi, PJUTS, konkit petani, konkit nelayan, itu juga bisa kita realisasikan di tahun 2025 nanti. Mungkin itu Pimpinan.

Terima kasih, mohon maaf kami akhiri.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,
Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.



F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua bisa bicara?

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Tadi Pak ini nunjuk dulu Pak, setelah itu Pak Ramson ya.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Karena terkait PJUTS juga sesudah saya dengar.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Ya terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri yang kami hormati,

Me-review komposisi anggaran Kementerian ESDM 2025 bahwa saya memberikan dukungan dan catatan terhadap ya nomenklatur terhadap program kemasyarakatan **(suara rekaman terputus 2.43.24)... (selanjutnya melihat & mendengar rekaman bersumber dari YouTube 2.40.45)**, di tahun 2024, untuk tahun 2025 tidak jauh ada perubahan terhadap nomenklaturnya Pak. Makanya kami memberikan dukungan apa yang disarankan, apa yang disampaikan oleh saudaraku Bambang Haryadi tadi.

Yang kedua bahwa catatan terhadap PJUTS, di daerah Dapil saya itu masih ada 150 unit belum terpasang dan sudah terlobangi semua Pak. Jadi timbullah lubang-lubang di 150 titik di Kecamatan Air Joman dan Kecamatan Sei Kepayang. Dan itu sudah ada mendapatkan korban ya yang terjerumus ke dalam lubang itu. Akhirnya saya terpaksa memberikan harus uang pengobatan kepada yang menerima musibah. Untuk itu kalau ada permasalahan terhadap pemborongnya ya, kalau pemborongnya tidak mempunyai kemampuan lagi untuk meneruskan tersebut. Tolong diadili saja ke pihak penegak hukum.

Selanjutnya, melansir dari apa yang telah dibicarakan oleh teman-teman terdahulu terhadap pipa gas bumi Cisem tahap 2 dan Dusem ya, Dumai- Sei Mangke. Saya perlu memberikan sebuah ilustrasi pada tahun 2012, kawasan Industri Sei Mangke ini diresmikan tahun 2012. Para investor sampai hari ini telah menunggu harga gas jauh lebih tinggi dan bahkan telah membeli *tenant-tenant* yang berada di kawasan Sei Mangke di PTPN 3.

Tahun 98 ya, seharusnya Sumatera Utara itu sebagai *show window* daripada Indonesia Bagian Barat ya, yang terlepas daripada persoalan, persoalan pertumbuhan ekonomi setelah pasca reformasi. Tetapi sampai hari ini ya Sumatera Utara itu ya tidak tumbuh karena persoalan gas. Industri saya pikir wilayah barat yang paling strategis itu adalah wilayah barat ya. Sumatera Utara di ujung Pulau Sumatera ya yang dikelilingi oleh kawasan samudra Indonesia yang mempunyai pelabuhan yang cukup baik.

Maka waktu itu presiden ya Presiden SBY meresmikan tahun 2012 dan beberapa kali Presiden Jokowi mengunjungi kembali Sei Mangke beserta kawasan industri Kuala Tanjung dan para investor sudah menunggu. Pelabuhan terbaik wilayah Sumatera Utara itu adalah Kuala Tanjung dengan kedalaman 27 meter.

Nah inilah sesungguhnya proyek strategis nasional yang berada di Kuala Tanjung. Hari ini juga masih menunggu, sudah hampir 12 tahun menunggu kapan dan kapan dialirkan gas dari Dumai sampai Sei Mangke. Kenapa ini? Ini sebuah proyek strategi nasional yang sesungguhnya ya sebagai wilayah barat yang membuka pintu gerbang kalau wilayah, wilayah timur ya, wilayah Tengah, saya pikir Surabaya dan Makasar dan sebagainya itu sudah terbuka. Nah ini juga Cisem juga sebagai wilayah tengah. Wilayah barat ini berada di posisi strategis di Sumatera Utara.

Kehadiran saya di Komisi VII pindahan dari Komisi VI sudah berada di sini 2,5 tahun, tujuannya hanya untuk perjuangan itu. Tujuannya yang hanya perjuangan itu bahwa ya sebagai proyek strategi nasional ya kini Sei Mangke harus hidup. Pelabuhan Kuala Tanjung dan kawasan industri Kuala Tanjung ini sebagai wilayah barat yang strategis dari untuk Sumatera Utara dan khususnya untuk ya, ya mewakili daerah Sumatera Pak ya. Karena apa? tol Sumatera hari ini hampir selesai. Salah satu pelabuhan strategisnya adalah wilayah barat itu berada di Sumatera.

Untuk itu ya atas nama masyarakat Sumatera Utara, saya pikir apa yang telah Bapak rilis di media, saya pikir enggak perlu ditarik lagi Pak, enggak perlu ditarik lagi pengalokasian. Namun, ya namun bagi Pak Dirjen ya yang mempunyai beberapa program tentunya perlu sama-sama kita menyisir ya. Jangan nanti ada kenapa saya dikurangi, ini tidak, ini dikurangi, ini tidak. Tentunya kita harus berbesar hati ya.

Ketika telah kita kompromikan ya dalam konteks *budgeting* yang berada di DPR ini bersama Pemerintah, tentunya kita harus mencari solusi yang terbaik terutama untuk pertumbuhan ekonomi dan untuk kemaslahatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Itu Pimpinan tambahan dari saya, terima kasih.

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):

Tambahan sedikit Pimpinan, boleh?

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H. /F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya



F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Pimpinan

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):

Pak Ramson.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Satu menit saja Pimpinan

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):

Saya sedikit aja cuman buat jadi catatan di sekretariat. Tolong besok pada saat pendalaman yang Cisem itu dari Dirjen Migas tolong presentasiin ya maksudnya secara *overall highlight*, apa, ininya Bagaimana *gitu*. Kenapa harus ada Cisem 1, kenapa harus ada Cisem 2, kenapa harus ada Dusem. Jangan sampai nanti nambah lagi kenapa harus ada Asem *gitu*, Cisem, Dusem, Asem. Jadi maksudnya biar kita juga ada, ada *knowledge* nih, karena mengingat anggarannya cukup besar.

Lalu yang kedua, Pak Menteri ini tolong menjadi bahan catatan bersama. Yang Cisem 1 itu kita ini dapat informasi itu sempat ada proses di lidik di KPK yaitu terhadap, apa tuh, salah satu urusan kontraktornya. Jadi tolong ini jadi catatan betul-betul karena mengingat anggarannya cukup besar loh. Jadi Cisem 1 dan Cisem 2 *gitu*. Jadi jangan sampai niatnya baik tapi implementasinya bermasalah atau bagaimana nanti malah jadi akhirnya jadi ke mana-mana ceritanya.

Itu aja Pak Menteri yang jadi penegasan saya. Ya mohon besok nanti Dirjen Migas di dalamin ya karena ceritanya itu enggak enak sekali itu. Jadi saya pikir di situ aja karena sampai hari ini pemahaman kami, kami dari Pimpinan. Maka tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang, kita itu dari Pimpinan Komisi VII dan dari Komisi VII semuanya dari Anggota maupun Pimpinan, kita melihat ini secara proporsional aja secara objektif aja *gitu*.

Jadi jangan sampai nanti giliran ada cerita-cerita proyek besar kayak begini seakan-akan, mohon maaf ya, ada dalam tanda kutip, ada praktik-praktik yang aneh-aneh lagi. Makanya saya selalu sampaikan itu. Jadi pemilihan dan proses tender, proses apa juga itu harus betul-betul serapi dan sebaik mungkin.

Nah terus *background* latar belakang keuangan juga harus dilihat itu karena ini *kan* proyek gede nih. Kemarin berapa tuh Pak yang Cisem 1 *kan* sekitar hampir 1 triliun, Cisem 2 saya dengar hampir berapa hampir 2 triliun, hampir, nah 2,9 triliun. Jadi ini hati-hati betul Pak. Saya minta tolong saya titip benar-benar kepada Bapak-Bapak semua karena saya juga gelisah. Gelisahnyanya apa? hari ini ada dua Dirjen, tersangka lagi.

Jadi kita ini sama-sama punya kesepemahaman dan kesadaran yang tinggilah terkait pertanggungjawaban dalam mengelola anggaran kita. Ya, itu penegasan saya. Ya terkadang nih namanya kontraktor datang kita di awal manis-manis Pak. Weh dengan segala *profile company* yang merasa dia yang paling top se-alam jagat raya ini. Tapi ternyata pada saat implementasinya semua bermasalah.

PJUTS juga itu, itu PJUTS tolong betul-betul jadi. *Kan* ada Pak Irjen juga Pak itu bisa ikut kontrol juga Pak. Itu PJUTS itu udah rahasia umum. Pasang kita di lapangan, enggak sampai 2 bulan, tig, paling top 6 bulan itu tergantung amal *sholeh* itu. Jadi kalau amal *sholeh* tiang listrik itu agak bai, agak bagus pada saat lagi proses penanam, pemasangannya Pak, dia berdoanya, wiridnya agak bagus, nah itu agak bisa mungkin bisa sekitar 5 ampe 6 bulan Pak.

Tapi kalau waktu dia nanam tiang listrik itu Pak, enggak pakai baca-baca Pak, wirid-wirid begitulah, itu 2 bulan 3 bulan aja tuh. Nah itu yang kayak *gitu-gitu* loh pak. Jadi maksud saya, jadi saya cuman apa saya mau menegaskan ini betul mumpung ada Pak Menteri karena kita harus jaga betul-betul semuanya. Artinya sampai detik hari ini kita merasa proses penentuan anggaran ini berdasarkan objektivitas dan semangat agar ESDM bisa mensukseskan program-program strategis nasional. Tapi jangan sampai nanti karena implementasi dan prosesnya bermasalah akhirnya jadi rusak semuanya Pak *image*-nya.

Itu aja Pak catatan saya.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

izin ya

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kalau karena Mba, Ibu Roro, Pak.

Iya Pak, Bu Roro dan Pak, apa, Pak Sartono, belum itu, Pak Sartono belum sempat bicara, saya persilakan dulu. Nanti terakhir Pak itu, ya Pak itu.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Dua menit, satu menit Pimpinan, makasih.

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Baik terima kasih.



Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya banggakan, serta, Bapak Menteri ESDM, Pak Arifin Tasrif beserta seluruh jajarannya termasuk Kepala SKK Migas dan juga dari PLN dan BPH Migas.

Jadi gini, saya ingin mengawali dengan bahwa kita harus mengingat kondisi yang saat ini kita alami, di mana pemerintahan saat ini *kan* mengalami sebuah proses transisi ya, proses transisi ke kepemimpinan berikutnya. Nah maka oleh karena itu RKA K/L yang saat ini kita susun itu harus sejalan dengan visi misi daripada pemerintah ke depannya. Itu yang pertama.

Lalu yang kedua, kita tahu bahwa salah satu program utama ke depannya adalah berkaitan mengenai transisi energi. Maka sorotan saya hanya di dua *slide* Pak Menteri. *Slide* nomor 20 dan *slide* nomor 21. Kita ketika kita berbicara mengenai transisi energi tentu ini harus beriringan dengan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan harus terefleksikan melalui anggaran yang ditetapkan.

Ketika kita bedah ulang *gitu* ya, bagaimana pengalokasian anggaran untuk misalnya sektor Minerba, sektor Migas dan EBTKE. EBTKE itu selalu, selalu tidak menjadi prioritas. Jadi 5,9% dari total anggaran yang dialokasikan di sektor energi ini di ranah Kementerian ESDM itu diperuntukkan EBTKE. Sedangkan untuk yang lainnya Minerba dia 7,9% *gitu* ya dari total anggarannya hingga kita melihat Migas di 51,4%.

Harapan besarnya ya, harapan besarnya adalah bahwa kami menyadari untuk bertransisi pasti tidak bisa energi konvensional langsung ke energi terbarukan. Kita selalu berbicara mengenai ini ya Pak Menteri ya tidak mungkin terjadi. Nah maka oleh karena itu harapan besarnya, anggaran yang telah diperuntukkan untuk sektor Migas ini kita amplifak, kita *amplify* untuk bagaimana mengedepankan mengedepankan gas, mohon maaf, dalam kita mendorong proses transisi tersebut.

Tapi yang saya sesali sebetulnya ya dengan pengalokasian anggaran seperti ini lagi-lagi EBTKE ini selalu menjadi, apa ya, tidak menjadi prioritas. Nah ini sesuatu hal yang harus kita, apa ya, bukan hanya bicarakan ulang tapi harus ada panggilan juga sih dari Kementerian-nya *gitu* untuk merubah dan berinovasi. Belum lagi tadi Bu Mercy juga menyampaikan mengenai ada baiknya loh kita mulai berbicara mengenai subsidi, apa tadi, EBTKE misalnya.

Lalu kemudian berapa pengalokasian anggaran yang diperuntukkan ketika kita berbicara mengenai pengurangan dari emisi karbon pada sektor energi. Ini saya rasa harus kita bicarakan juga *gitu*, tidak cukup kita berbicara seperti ini hanya di ranah internasional. Kita membanggakan posisi negara Indonesia tapi nyatanya dalam negerinya seperti ini *gitu*.

Jadi ini menjadi *concern* utama saya ya dan saya rasa pemerintah ke depannya juga akan selalu menekankan mengenai bagaimana Indonesia bisa



bertransisi dengan mengoptimalkan juga sisi US ya dengan, apa, sektor, sektor Migas kita yang saat ini sedang berkembang juga yang kita harapkan masih ada produksinya *gitu*, tapi harus beriringan dengan teknologi-teknologi yang bisa kemudian menyerap emisi karbonnya.

Lalu yang kedua adalah terkait Indonesia Emas Tahun 2045, kita selalu mengedepankan ini. Baik dari segi ekonomi, kita mengoptimalkan bonus demografi kita, 70% dari total penduduk kita adalah di kalangan produktif ya *kan*. Lalu kemudian juga bagaimana bukan hanya secara ekonomi kita naik tetapi secara sosial hingga lingkungan juga terjaga dengan baik.

Nah oleh karena itu, ini menjadi poin terakhir saya sebetulnya berkaitan mengenai apa yang telah dipaparkan di *slide* nomor 21. Kita tahu bahwa komposisi anggaran sudah diperuntukkan kurang lebih 55,3% dari total anggaran yang diajukan, itu adalah dialokasikan untuk infrastruktur masyarakat.

Nah maka dalam hal ini saya mempertanyakan kembali *gitu* dan memang sudah sebetulnya diutarakan oleh teman-teman saya sebelumnya. Untuk kita menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045 tidak lepas dari bagaimana kita meningkatkan kualitas dari SDM kita, bagaimana kita meningkatkan produktivitas kita ke depannya.

Dan semua ini bisa kita lakukan dengan cara apa? Kita memberikan infrastruktur-infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat-masyarakat kecil seperti para nelayan, para petani. Nah maka dari sini saya melihat *gitu* bahwa catatan mengenai konkrit nelayan dan petani tidak tertulis di sini. Tadi seolah kita dikasih PR, PR ekstra *gitu*-lah ya untuk meningkatkan anggaran agar dapat. Tapi kami sebagai wakil rakyat kenapa harus melakukan itu ketika sebetulnya hal-hal seperti ini harusnya sudah kita mempunyai *frame of Mind* yang sama *gitu*, bahwa ada kebutuhan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam hal ini.

Banyak sekali keunggulan ya dari program-program seperti itu, misalnya para nelayan bisa lebih hemat ketika mereka melaut, dari segi transisi energinya juga terjamin karena menggunakan gas, lalu kemudian untuk para petani bisa lebih produktif. Otomatis *multiplayer* efeknya akan jalan *gitu*, mereka bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonominya, mereka bisa, apa, mendapatkan penghasilan dari situ dan bisa menjadi kelompok yang produktif, SDM yang produktif. Ini sangat amat mendukung sebetulnya esensi dari terbentuknya Indonesia Emas Tahun 2045.

Nah maka pertanyaan kami dalam hal ini adalah kenapa hal-hal seperti ini harus seolah di-*ignore* *gitu* bahwa seolah seakan program-program ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Menurut saya justru, apa ya, keberpihakan Kementerian ESDM terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat tidak tercerminkan melalui apa yang telah dipaparkan kepada kami hari ini.

Nah maka saya mohon sekali agar kita semua hari ini diberi amanah yang sangat amat luar biasa. Amanah adalah titipan dan saya rasa kita semua

bisa introspeksilah bagaimana kita bisa maksimal dalam menggunakan kesempatan yang diberikan, terobosan apa yang ingin kita lakukan? Apakah selama ini kita betul-betul hadir untuk masyarakat atau kita hanya hadir untuk kepentingan-kepentingan tertentu?

Saya ingin sekali mengajak kita semua untuk bukan hanya introspeksi tapi menyusun anggaran sesuai dengan hati nurani kita yang di mana kita memprioritaskan masyarakat. Karena pada dasarnya baik Pemerintah maupun DPR RI kerjanya untuk mensejahterakan masyarakat, betul perekonomian bangsa juga tapi pada intinya esensinya adalah bagaimana kita bisa berdampak positif kepada orang yang lain.

Itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Izin Pimpinan

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya Pak Ketua

F-NASDEM/ KETUA KOMISI VII DPR RI (SUGENG SUPARWOTO):

Saya lanjutkan, Pak Sartono setelah itu Pak Ramson.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Terima kasih Pimpinan.

Melanjutkan apa yang disampaikan oleh para sahabat. Pak Menteri ini,

Pimpinan izin, mungkin Bapak-Bapak ada yang mau istirahat salat dan sebagainya perlu juga diberikan waktu juga.

Pak Menteri saya ini *me-refresh* begitu ya tentang proyek Cisem tahap 2, tahap 1 dan juga proses yang panjang ya Cisem ini. Cisem ini *kan* sebetulnya proyek strategi, apa, proyek strategis nasional *multi year* ya kontrak ini. Ini yang juga harus kita pahami bersama bahwa pada prinsipnya, ya ini harus selesai, kalau saya melihatnya begitu. Dan dengan harapan *kan* memberikan dampak terhadap, tentu itu juga kesejahteraan ya rakyat mungkin juga ada proyek kawasan ekonomi, apa ya waktu itu, industri kalau *ndak* salah ya.

Dan ini melihatnya secara apa ya komprehensif lah. Ini *kan* juga mungkin tidak hanya di ESDM ini *kan* juga mungkin kebijakan makro perekonomian mungkin ya Menteri Menko begitu ya. Ini juga harus kita lihat di situ juga. Dan proyek tidak boleh berhenti. Ya kalau ini menjadikan proyek yang

nasional ya juga harus, apa itu, dilanjutkan. Kalau mangkrak *kan* juga *cost* biayanya juga apa sangat memberikan dampak yang luar biasa *gitu* terhadap investasi ke depannya ini pertama.

Tapi tadi juga mengingatkan kehati-hatian supaya juga tidak ada terjadi temuan, ada permasalahan hukum. Jadi itu penting untuk koordinasi untuk disampaikan, digelar dengan aparat-aparat yang selalu mengawasi begitu KPK, kejaksaan, kepolisian, *gitu kan* seperti ini *gitu* supaya tidak ada permasalahan begitu. Kalau itu, apa, istilahnya dari awal sudah disampaikan insya Allah juga tidak ada, apa itu, permasalahan-permasalahan temuan masalah hukum. Ini yang juga menjadi *concern* kami begitu.

Juga tadi tentang betul di sini *kan* rencana anggaran alokasikan untuk infrastruktur masyarakat. Betul ini saya juga lihat program-program untuk masyarakat yang langsung menerima juga *ndak* ada ya dihilangkan. Kita ketahui periode di tahun 2003 kemarin *kan* anggaran khususnya PJUTS itu dari awal ini *kan* juga, apa, banyak permasalahan begitu, mangkrak tadi disampaikan beberapa sahabat begitu juga belum operasi 1 minggu, 2 minggu mati.

Nah ini ini juga apa serius begitu. Ini tadi teman ada juga, apa, ada menyampaikan ada temuan-temuan itu yang akan ditindak lanjuti katanya dari pihak, apa, penegak hukum. Tapi, apa, di dalam masuk triwulan ke-3 tahun 2000 4 anggaran ini, ini *kan* serapannya *kan* minim ya. Nah saya mengusulkan begitu agar program yang untuk masyarakat itu tidak dihilangkan *gitu*, tidak boleh dihilangkan.

Ya walaupun mungkin program untuk masyarakat ini khususnya PJUTS itu bisa tidak mungkin nanti dialihkan lain program-program Bimtek misalnya yang langsung bersentuhan juga dengan masyarakat. Bimtek di sini misalnya apa terkait program biodiesel ya toh atau kendaraan listrik ya, ekonomi hijau itu *kan* berhubungan ini dengan Kementerian ESDM. Nah dialihkan ke situ yang juga langsung bersentuhan juga dengan masyarakat.

Kalau PJUTS diteruskan banyak permasalahan, bom waktu juga itu. Kalau ada listrik mati kita yang ditagih ini. Jadi kita mengeluarkan dana pribadi untuk itu. Ya akhirnya apa itu yang terjadi dan apa ini tuntutan dari masyarakat luar biasa untuk hal tersebut. Ini mungkin.

Jadi program-program yang pro rakyat atau yang bersentuhan dengan rakyat mungkin jangan sewaktu-waktu hilang ya mungkin bisa dialihkan untuk memberikan pencerahan kepada apa energi ke depan misalnya dan juga itu kan perlu sosialisasi. Ini *kan* berhubungan dengan apa era apa *green energy* misalnya, era yang juga nanti ke depannya kita tidak akan menggunakan apa fosil energi misalnya dialihkan ke bimbingan teknis juga menarik juga.

Pimpinan mungkin sementara itu yang lain nanti itu tentang temuan-temuan oplosan LPG. Itu juga harus ada tindakan yang keras itu Pak walaupun nanti siapa yang di lapangan itu oplosan-oplosan yang ditemukan itu. Kasihan juga masyarakat harusnya 3 kilogram enggak tahunya hanya 2. Siapa di sini

pengawasannya? ini juga perlu harus apa keras begitu menghadapi oknum-oknum ini. Jadi tadi disampaikan harus konferensi pers itu tahapan-tahapan tindakannya dan juga progresnya bagaimana perlu disosialisasikan disampaikan juga. Jadi ada kepastian tentang hal ini.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Makasih.

Silakan Pak Ramson.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Makasih Pak Ketua.

Saya to the point aja singkat aja.

Sesudah saya baca RKA K/L 2025, ini *kan* masih rencana kerja Pemerintah, belum RAPBN sebenarnya. RAPBN itu kalau sudah disampaikan oleh Pak Presiden nanti tanggal 15 atau 16 Agustus. Ini sebagai referensi kepada Pak Presiden. Jadi ini bisa dirubah oleh DPR RI, oleh Komisi VII fungsi *budget*-nya.

Poin yang saya mau *stressing* ini, PJUTS-nya tidak ada. Sementara untuk Cisem sama Dusem ini, 4,2 triliun lebih. Jadi metode pengalokasiannya ini enggak tepat nih Pak Menteri. PJUTS infrastruktur untuk masyarakat ini sangat diperlukan. Jadi di daerah-daerah PJUTS itu sangat diperlukan karena lampu jalan oleh PLN itu masih sulit ke daerah-daerah tertentu, masih dikit, masih dikit.

Sementara kalau PJUTS itu, itu publik yang menggunakannya, umum *gitu*. Konkrit nelayan sangat perlu tapi itu hanya prof, profesi nelayan. Nah tapi kalau PJUTS umum menggunakannya, jadi jadi baik yang anak kecil, yang remaja, yang mau ke masjid, yang mau salat malam, semua, yang mau jalan-jalan, semua menggunakannya *gitu*. Iya mau ngantar katanya apa mau ke makam. Jadi PJUTS ini sangat diperlukan karena di daerah-daerah juga anggaran untuk pembangunan lampu jalan itu masih sangat minim.

Jadi ini Pak Ketua kita punya hak *budget*. Kita perlu mengupayakan agar PJUTS masuk di rencana RKA K/L 2025 ini agar nanti di dalam pidato Pak Presiden itu sudah masuk. Ini bisa dikurangi nih Cisem sama Dusem ini dan lagi Cisem 2 ini kalau mau dimasukkan harus dibuat dulu laporan oleh Pemerintah oleh Kementerian ESDM progres pelaksanaan Cisem 1 yang sudah ditentukan anggarannya mungkin masih ada bermasalah. Waktu itu saya juga lupa-lupa ingat. Jadi itu perlu dibuat laporan dulu baru ini kita tetapkan Pak Ketua.

Itu aja dari saya agar catatan penting PJUTS masuk di dalam rencana untuk referensi bagi Pak Presiden nanti menyampaikan RAPBN karena ini belum RAPBN. Jadi pembahasan sesudah 16 Agustus itu baru kita membahas namanya rancangan APBN.

Demikian Pak Ketua singkat saja kalau yang lain-lain tadi sudah disampaikan oleh teman-teman.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak ramson.

Pak Nur Hasan? Ya silakan Pak Nur Hasan.

Sebelumnya saya perpanjang lagi ya, setengah jam 30 menit, waktu kita sampai dengan pukul 15 pas.

(KETOK PALU 1 KALI)

Silakan Pak.

F-PKS (H. NUR HASAN ZAIDI, S.Sos.I):

Iya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri ESDM, Sekjen, Dirjen serta jajarannya.

Saya pikir sudah banyak diungkap apa yang disampaikan teman-teman. Cuman mungkin supaya ada rasa kenasionalannya. Walaupun mungkin saya sudah berulang pertanyaan itu tapi ini mencerminkan supaya sampelnya lebih luas. Tadi masalah PJUTS ini juga luar biasa, kebijakan ini energi baru terbarukan memaksimalkan energi baru. Tiangnya kokoh, bagus, kokoh dah itu, ya tiangnya kokoh PJUTS nih, tapi lampunya mati mulu.

Ini perlu dievaluasi serius. Ini banyak yang mati, apa, di tempat saya atau umum atau mungkin kebenaran takdir nya di tempat saya. Ini perlu dievaluasi. Sayang itu tiang sudah kokoh. Jadi dan cepat diantisipasi itu *kan* mesin solar *cell*-nya atau mesinnya itu yang mahal itu *kan* tinggal diutak-atik aja sama ahlinya. Kalau saya *kan* ahli agama, enggak ngerti.

Nah jadi itu satu, yang kedua pertanyaan berikutnya adalah persoalan mungkin sudah dikemukakan tadi di Pimpinan Pak Sugeng menyampaikan mendahului ketika rapat di ruang Pimpinan Komisi, masalah hak kekhususan tentang ormas keagamaan di dalam pertambangan. Ini menarik juga ya. Sepertinya menghibur tapi realisasinya enggak gampang juga ini. Ya kita sih enggak *geer* juga teman-teman ormas, NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, banyak Ormas yang lahir sebelum republik ini lahir.

Itu paling mungkin 15 ormas keagamaan ya salah satunya PUI yang Pimpinan Ormas banyak di Jawa Barat. Karena setiap ormas itu ada basis utamanya, ada yang di Mathla'ul Anwar di Banten, PUI di Jawa Barat, NU Jawa Timur, ada Nahdlatul Wathan punya ribuan sekolah. Memang sekolah ini nasibnya "*Laa Yahya wa Laa Yamut*" tidak hidup, tidak mati karena kekurangan bantuan dari Pemerintah.

Ini Madrasah sekolah lahir sebelum republik lahir bahkan tanah-tanahnya Ormas ini dipakai oleh tanah pemerintah, kayak Sultan Jogja itu *kan*, Gajah Mada aja di kampus Gajah Mada *kan* milik Sultan. Ada milik Muhammadiyah, milik NU. Makanya ini nanti pertanyaannya berikutnya. Artinya kontribusi ormas ini luar biasa. Dan saya juga sisi lain mengapresiasi kebijakan Jokowi dalam pidato dulu di Kantor NU dari awal 3 tahun yang lalu itu *kan* dan ini sudah dikeluarkan PP-nya sangat sederhana teknis.

Nah pertanyaan saya di Komisi VII ini juga pro kontra juga apalagi Pak Sugeng tapi saya sih setuju-setuju aja. Tapi ini Ormas Keagamaan ini, ya nanti *ente* bantu ya PUI ya. Nah jadi Ormas Keagamaan ini Pak beberapa kali ngelola bank, ngelola apa bangkrut mulu pak, cuman biasa ngaji doang Pak. Jadi ilmu ilmu *qauliyah* itu *kan* biasa ngaji kitab, suruh ngaji, ngaji juga, ngaji alam, pertambangan tentu mungkin bekerja sama dengan pihak ketiga.

Artinya secara teknis ini *kan* baru PP, Permennya atau Juknisnya ini dipandu dengan baik Pak. Ini juga harus dilakukan tentu secara profesional ya. Ini hak *privilege* dari Presiden dari Pemerintah ini kita hargai, kita hargai. Dan kita juga akan ambil karena sudah diberi terus ngeritik-ngeritik *kan* enggak enak juga yang memberi, kayak Allah ngasih *salat jamak qashar gitu, jamak takhir*, enggak diambil.

Itu nanti dianggap sombong *ente* udah dikasih kemudahan shalat di *jamak takhir gitu kan*, enggak diambil, itu dianggap. Saya khawatir yang Ormas dianggap sombong Pak, pemerintah sudah baik atau nanti transisi berikutnya berlanjut atau tidak. Ini sisi lain untuk pemberdayaan.

Saya terima kasih mudah-mudahan ESDM dan ini harus mendampingi secara *detail* Pak. Jangan sampai ujung-ujungnya PHP karena karena pro kontranya cukup tinggi juga ini **(suara rekaman terputus 3.16.08) ... (selanjutnya melihat & mendengar rekaman bersumber dari YouTube 3.13.21),**

Wallahualam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya, Pak Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Saya mau tanya, yang bicara tadi atas nama Anggota Komisi VII, atas nama ketua PUI?

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik ya Ibu Bapak, saya kira.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Pak Edi.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke yang terakhir ya

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Ya, ya, terakhir.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik silakan.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua, Pak Menteri, Pak Dirjen dan seluruh ya Kementerian ESDM yang hadir dan juga para Direktur yang mendampingi.

Pertama saya mengingatkan aja kepada Pak Menteri ya, walaupun ini adalah satu kebijakan dari Pak Presiden khususnya menyangkut Ormas yang untuk mendapat tambang ya. Di masyarakat ya memang cukup ramai *gitu* bahkan tadi sempat saya sampaikan apakah nanti juga hak dari ormas keagamaan ini dari tingkat ranting *gitu* juga yang ada di desa kemudian juga yang ada di ini ya tentu harapan saya itu memang diatur dan dipertegas kapan perlu disosialisasikan secepatnya *gitu*.

Supaya ini tidak menjadi pro kontra yang akhirnya niat baik dari Pemerintah ya akhirnya jadi rancu, artinya pro kontra. Nah maka untuk itu sebaiknya hal ini seger, dibi, dibi, dibicarakan. Tetapi juga kita memahami Pak Menteri karena memang tujuannya nanti ada lokasi-lokasinya itu adalah di daerah-daerah PKB, PKB ya, PKB 2B yang tentu juga berarti mengancam mereka Pak ya. Dan kita tahu bahwa PKB 2B ini ya artinya perizinannya cukup strategis ya mungkin antara Pemerintah dan Pemerintah luar ya, mungkin seperti itu ya.

Dan ini *kan* juga akan mengganggu iklim investasi yang ada terutama bagi investor dari luar. Dan ini juga perlu diperjelas *gitu* yang mereka akan dapatkan dari PKB 2B ini itu yang bagaimana *gitu*. Nah maka untuk itu juga jangan sampai simpang siur untuk mendapatkan ini.

Dan banyak sekali ormas keagamaan itu yang dengan diumumkan ini ya karena semangat Pak. Jadi mereka itu menurut saya perlu ada penjelasan atau yang menjelaskan baik itu teknis dan juga apa masukan-masukan mereka nanti dalam rangka kita membuat Juknis atau Peraturan turunan dari Kepres ini. Itu yang pertama.

Yang kedua Pak Menteri, saya pertama menyampaikan apresiasi dan terima kasih ini kepada Pak Dirjen Listrik yang di sebelah Bapak Menteri ini ya. Karena lusa kami tanggal 8, tanggal 7 itu akan melaksanakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan Gubernur, Bupati Walikota dan Pimpinan DPR Pak ya, DPRD-nya maksud kami, untuk membahas percepatan pembangunan listrik di Kalimantan Tengah, yang selama ini ya ini ini aja yang sering kami bahas kenapa karena memang kondisi listrik di Kalteng itu sangat minim.

Nah maka oleh karena itu saya ingin dukungan, *support* dari Pak Menteri ya agar nanti realisasi dari pertemuan *FGD* ataupun kesimpulannya nanti dibantu terutama anggaran yang memang cukup besar Pak. Kalau kita sudah melihat rancangan yang dari PLN itu kurang lebih 1,2 triliun itu baru listrik Desa itu nyala di Kalimantan Tengah karena lebih dari 300-an desa yang artinya belum masuk PLN.

Nah maka untuk itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan juga mengingatkan kepada Pak Menteri agar nanti hasilnya ini nanti betul-betul bisa direalisasi agar dapat pinjaman penyertaan modal negara mungkin seperti itu.

Demikian Pak Menteri dan Pimpinan. Saya kembalikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih.



Tadi kita sepakati ini sudah pertanyaan terakhir. Sudah banyak yang disampaikan dan kita juga sudah apa mencatat isu-isu yang memang akan kita kemudian lakukan pendalamannya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.

Saya persilakan kalau Pak Menteri ada yang ingin ditanggapi, kalau tidak nanti kita akan langsung bacakan draf kesimpulan sebelum kita tutup agenda pada siang hari ini.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Sedikit aja Mba, Pak Ketua.

Jadi Kementerian itu tidak tidak ada niatan sedikit pun untuk memotong program ya. Sebetulnya usulan kami untuk anggaran tahun 2025 itu lebih dari 11 triliun tapi *output*-nya adalah yang apa yang saya yang kita paparkan yang bisa kita paparkan pada hari ini. Nah untuk itu memang kita sangat, sangat memahami ya pentingnya infrastruktur energi ya, pentingnya juga untuk energi kepada masyarakat-masyarakat yang program-program sudah ada ya.

Jadi program untuk memanfaatkan energi bersih baru terbarukan di daerah terpencil ya, baik daripada solar maupun juga dari *ocean* ya, *ocean*. Tapi ini kita memang perlu perlu anggaran yang banyak untuk bisa apa untuk itu. Memang kementerian sekarang ini juga men, menyusun program-program yang terkait dengan efisiensi ya *housekeeping* efisiensi energi apa yang bisa dilakukan sehingga memang ada ada penghematan anggaran yang mungkin bisa dialokasikan.

Jadi antara lain konversi dari diesel ke gas ya, itu gasnya sudah ada ya. Jadi kita sangat, untuk transisi ini kita perlu dukungan *availability* daripada gas alam energi yang lebih bersih dan banyak, masih banyak sumbernya di, apa, di, di Indonesia yang kita tidak, belum miliki adalah jaringan infrastrukturnya untuk yang memadai untuk bisa men, membangun sistem ketahanan energi untuk masyarakat dengan.

F-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (H. BAMBANG HARYADI, S.E.):

Izin Pak Menteri, sedikit.

Kami memahami setiap Rancangan Undang-Undang RAPBN pasti setiap Kementerian itu mengusulkan lebih dari pagu yang ditetapkan Kemenkeu maupun Bappenas *kan*. Namun di sini *kan* hak Kementerian untuk lebih selektif mana program-program yang akan dipertahankan atau enggak, harusnya di situ ada poin program yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu sebaiknya dipertahankan.

Ini malah kayak PJUTS, itu sudah program bertahun-tahun *kan* sejak 2000 berapa itu sudah lama lah *kan*. Nah kok tiba ujug-ujug sekarang malah hilang, malah di sini kayak semacam konsultan pengawasan pembangunan migas. Ini *kan* kegiatan, bukan lagi ini. Di sini nilainya 48 miliar misalnya *kan*

ada lagi perencanaan apa itu yang sifatnya ini tidak bersentuhan langsung dengan rakyat *gitu* loh.

Yang kami maksud itu, kita tolonglah pertahankan. Disini sebenarnya nilainya ESDM di sini. Sekarang di masyarakat itu terkenal ESDM itu yang bantu listrik gratis, yang bantu pasang PJUTS bahkan terakhir sempat diledak, apa, apa ya, sempat di-*bully* tapi akhirnya masyarakat dibawah merasakan betapa itu pentingnya namanya bantuan alat masak listrik.

Nah ini sebenarnya kegiatan-kegiatan yang populis, populis dan memang emang bersentuhan dengan rakyat. Dan kami sebagai politisi, kami mendukung karena ini ada efek *electoral* juga *kan*. Jadi jangan kita *kan* hanya melihat dari sisi, kita harus berapa aspek Pak? Kita harus kedepankan tuh aspek popularitas *kan*. Kalau kami *kan* populer tapi juga bagus *kan* karena akan bermanfaat bagi kami Anggota DPR *elektabilitas*.

Tapi kalau soal *isitas* kami enggak tahu Pak, kami enggak ikut-ikut. Makanya kalau kita bermain di dua aspek hanya popularitas dan efek elek, *elektoral*, *elektoral* itu *ndak* ada masalah Pak *kan*. Tapi jangan coba-coba bermain-main dengan tujuan yang *isitas*, tuh *kan*, nah halal. Semacam itulah yang kami pikir bahwa kita bekerjalah sesuai norma, ikutin prosedur.

Jadi kami pengin tahu dasarnya menghilangkan PJUTS itu apa? Apakah karena ada yang tadi kami dengar ya. Kami dengar ada penyidikan terkait PJUTS dari tahun 2018 ke 2023 *kan* itu, apakah itu benar atau enggak *kan gitu* loh *gitu*. Makanya kami *pengin* tahu. Jangan sampai sebuah program dihilangkan hanya karena ada proses hukum *gitu* loh, biarlah hukum bekerja dengan caranya. Tapi kita sebagai penyelenggara negara, kita bekerja dengan cara kita untuk tujuan masyarakat. Itu Pak

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Terima kasih Pak Haryadi.

Jadi kita sebagaimana saya sampaikan ya, niatan dari Kementerian ini adalah untuk bisa menyediakan energi untuk masyarakat. Itu itu sudah, apa, udah jadi amanah ya. Jadi terkait pelaksanaannya, nah ini tentu saja perlu kita kerja sama, perlu dukungan ya bagaimana kita bisa mencapainya.

Jadi mungkin dalam RDP yang besok ini mungkin bisa dipaparkan lebih detail lagi ya untuk sehingga bisa ada pengertian yang lebih lebih mendalam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik terima kasih

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, sedikit.

Pak Menteri, ini *kan* pipa gas bumi ini *kan* sebagian besar ini *kan* punya aspek bisnis, ini ada tol *fee*. INI seharusnya ada kebijakan yang mengkombinasikan seperti jalan tol. Sehingga ya harus ada dong dari Pemerintah, ada ide *gitu* maksudnya, ada kreativitas karena nanti *kan* perusahaan-perusahaan gas bumi yang akan mengalirkan gas itu dari pipa, nanti *kan* mereka bayar tol *fee* juga. Jadi harus diupayakan.

Sementara PJUTS itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Jadi di situ seperti tadi jangan karena Kementerian ESDM kurang piawai mengelola pelaksanaan pembangunan PJUTS, padahal itu diperlukan oleh masyarakat juga termasuk energi terbarukan tapi energi terbarukan yang penggunaannya itu merata merakyat *gitu*, itu malah di stop, ah itu enggak bijak Pak, enggak benar *gitu*.

Jadi diperlukan kepiawaian mengelola itu pembangunan PJUTS. Karena di satu sisi dalam proses transisi energi, itu juga energi terbarukan jadi dari aspek itu juga oke, dari aspek keperluan masyarakat karena perlu penerangan umum di masyarakat, nah itu juga oke. Jadi harus dilihat dari berbagai macam aspek Pak Menteri.

Jadi kita sarankan agar itu dimasukkan lagi di dalam perencanaan ini untuk nanti kita bahas Pak Ketua. Kira-kira *gitu* ya pak ketua ya. Karena kita *kan* dari sisi tadi itu transisi energi, oke. Keperluan masyarakat yang memang belum ada alternatifnya, itu juga oke. Jadi pas.

Makasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, terima kasih.

Kita sepakat nanti dalam pembahasan selanjutnya tentu akan kita sisir lebih lanjut lagi kita dalam beserta seluruh Eselon I dari Kementerian ESDM, sebagaimana kita lakukan dari tahun ke tahun dan itu biasanya seru Pak Menteri.

Baik Ibu Bapak sekalian,

Kita ini ya, kita sekarang bacakan kesimpulan dari Rapat Kerja kita pada siang menjelang sore hari ini, kita bacakan kesimpulan. Memang sudah jelang waktu jam 3, kasihan Ibu Bapak ada sebagian belum menunaikan ibadah salat zuhur. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sebelum, apa, zuhur nya berakhir.

Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM RI, Rabu 5 Juni 2024.

1. Pertama, Komisi VII DPR RI telah mendengarkan paparan Menteri ESDM terkait asumsi dasar sektor ESDM dalam RAPBN tahun 2000, dan Tahun Anggaran 2025 dan akan melakukan pendalaman lebih lanjut.

Setuju ya Ibu Bapak?

F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (H. BAMBANG HARYADI, S.E.):

Sebaiknya gini Pak Ketua. Karena kita pengalaman kejadian kemarin nih Pak Dadan nih kelakuan nih *kan*. Makna dari pendalaman itu belum ada persetujuan loh *kan*. Jadi yang kemarin diajuin Pak Dadan revisi itu belum sah. Karena, karena jelas di Peraturan Menteri Keuangan itu wajib disetujui. Tapi Pak Dadan pakai dasar dari kesimpulan Raker Komisi VII yang tidak ada makna persetujuan. Makna pendalaman itu belum ada persetujuan.

Jadi saya pikir, Komisi VII telah mendengar paparan menteri ESDM terkait asumsi dasar sektor ESDM dalam RAPBN dan akan melaksanakan pendahuluan, pendalaman lebih lanjut sebelum dilakukan persetujuan *gitu*.

Saya kebetulan Anggota Banggar, saya akan protes besok di Badan Anggaran terkait usulan Kementerian ESDM. Saya salah satu Pimpinan yang enggak tanda tangan loh, saya bilang tuh. Jadi saya akan nyatakan protes ke Kementerian Keuangan dan Dirjen Anggaran *kan*. Karena itu cacat prosedur.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bisa setuju ya sekarang Ibu Bapak? Setuju ya? Oke.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik.

2. Dua, Komisi VII DPR RI memahami penjelasan Menteri ESDM RI terkait Pagu Indikatif Kementerian ESDM RI Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.385.203.730.000.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Ketua.

Memahami diganti dengan bahasa yang lain lah

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Telah mendengarkan atau telah menerima penjelasan ya?

Telah menerima ya?

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pas, pas, mendengarkan, mendengarkan Pak Ketua.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Telah menerima ya?

Mendengarkan ya, mendengarkan ya.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Dan akan melakukan pendalaman pembahasan lebih lanjut, okelah. Yang penting mendengarkan, tidak memahami. Karena masih kurang paham Pak Ketua, apa yang diajukan oleh Pak Menteri. Dari aspek sisi, ini dari anggaran *gitu*.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke. Gimana Pak?

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Gagal paham soalnya.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

2025 ya. Baik.

Oke, baik ya.

Jadi tadi kata memahami kami ganti dengan mendengarkan. Kemudian saya lanjutkan dan akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan seluruh eselon I Kementerian ESDM RI.

Bagaimana Ibu Bapak? Setuju ya? Setuju ya? Baik.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

3. Yang ketiga, Komisi VII DPR RI telah mendengarkan paparan Menteri ESDM RI terkait hasil pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional, RPP KEN, dan akan melakukan pendalaman lebih lanjut.

Ada masukan?

Saya kira setuju ya? Baik, oke.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian.

Sebelum kami tutup, kami persilakan Pak Menteri untuk bisa memberikan sambutan penutup.

Silakan Pak.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati,

Kami sampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan pada hari ini melakukan pembahasan dan telah mendengarkan paparan kami terkait dengan Rencana Anggaran Kementerian dan juga pengantar RKA K/L serta draf dari penetapan PP tentang Kebijakan Energi Nasional. Kami memperhatikan seluruh masukan dari Ibu Bapak, sekan, sekalian dan kita akan, tentu saya akan menindak lanjutinya sebagaimana yang sudah disepakati dalam kesimpulan rapat ya.

Kurang lebihnya kami mohon maaf dan ucapkan terima kasih sekali lagi dan penghargaan atas kerjasama dan dukungan dari Bapak Ibu Komisi VII DPR RI.

Terima kasih.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh,

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri dengan seluruh jajaran. Ucapan terima kasih kami sampaikan pada Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir pada rapat kerja pada sore hari ini dan dengan mengucapkan “*alhamdulillah*” serta ini kami nyatakan rapat kerja ditutup.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.58 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Dwiyanti, S.Sos.
NIP. 196903131990032002**



A small, handwritten mark or signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive mark.